

**LAPORAN HASIL PENELITIAN**

**KAJIAN POLARISASI DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
DI PROVINSI JAWA BARAT**

**Ketua Peneliti:**

Leo Agustino, PhD

**Anggota Peneliti:**

Firman Manan, MA.  
Idil Akbar, MIP.

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI JAWA BARAT  
(Kesbangpol Jabar)**

**2022**

**LAPORAN PENELITIAN**

**KAJIAN POLARISASI DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
DI PROVINSI JAWA BARAT**

**Ketua Peneliti:**

Leo Agustino, PhD

**Anggota Peneliti:**

Firman Manan, MA.

Idil Akbar, MIP.

Feri Kurniawan, S.E. (*Research Assistance*)

Jonah Silas, S.IP. (*Research Assistance*)

Biaya Penelitian : Rp. 100.000.000

Dibiyai oleh : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Jawa Barat  
(Kesbangpol Jabar)



## PRAKATA

Puji dan syukur kami panjatkan kepada khadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Laporan terkait Kajian Polarisasi dan Kerukunan Umat Beragama Masyarakat Jawa Barat Tahun 2022 dapat diselesaikan tanpa adanya hambatan yang berarti. Bukan hanya karena hal tersebut, rasa syukur terhadap hasil yang ditemukan dalam Analisa Kajian Polarisasi dan Kerukunan Umat Beragama Masyarakat Jawa Barat Tahun 2022 di dalam Laporan ini.

Apa yang disajikan di dalam laporan ini merupakan hasil dari Analisa terkait dengan polarisasi masyarakat di Jawa Barat Tahun 2022 terutama yang digunakan untuk mengukur potensi polarisasi masyarakat Jawa Barat, terutama menjelang tahun politik di tahun 2024, serta menunjukkan kondisi dari tinggi atau rendahnya kondisi dari suatu kerukunan umat beragama di dalam masyarakat Jawa Barat tersebut, terlebih dalam menyongsong tahun politik di tahun 2024. Survei ini dilaksanakan di Kabupaten Kota di Jawa Barat dengan menggunakan *mix method* metode pengumpulan data indeks digunakan teknik survei deskriptif, yang pengumpulan datanya melalui kuesioner mengenai tingkat toleransi suatu wilayah. Hasil dari survei yang disampaikan dalam laporan ini semoga berguna dan memacu semua pihak untuk bekerja lebih efektif dan efisien dalam menangani isu polarisasi yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan yang baik ini juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu kami dalam menyelesaikan laporan ini. Dengan ini pula kami memohon maaf atas kesalahan serta kekurangan dalam pekerjaan kami. Kami berharap apa yang kerjakan dan hasil yang disajikan menjadi sumbangsih demi terwujudnya Jawa Barat sebagai provinsi dengan tingkat toleransi yang tinggi demi menekan tingkat polarisasi dan meningkatkan kondisi kerukunan umat beragama dalam menyongsong tahun politik di tahun 2024.

Bandung, November 2022

**Leo Agustino, PhD**  
Ketua Tim Peneliti

## DAFTAR ISI

<b>PRAKATA.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1    LATAR BELAKANG.....	1
1.2    RUMUSAN MASALAH .....	3
1.3    MAKSUD, TUJUAN DAN, SASARAN PENELITIAN .....	4
1.4    MANFAAT .....	4
1.5    LANDASAN HUKUM.....	5
1.6    RUANG LINGKUP .....	5
1.7    KELUARAN.....	5
1.8    KUALIFIKASI PERSONIL .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1    Polarisasi .....	9
2.1.1    Agama dan Polarisasi .....	10
2.1.2    Polarisasi secara kepemiluan .....	11
2.2    Kerukunan Umat Beragama .....	12
2.2.1    Multikulturalisme .....	13
2.2.2    Model Kerukunan Umat Beragama ala Mukti Ali .....	15
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>22</b>
3.1    Desain Penelitian.....	22
3.2    Tahapan Penyusunan Data .....	23
3.3    Teknik Pengumpulan Data .....	23
3.4    Teknik Analisis Data.....	24
3.5    Validitas Data.....	25
3.6    Jangka Waktu Pelaksanaan .....	25
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>28</b>
4.1    Gambaran Umum Provinsi Jawa Barat .....	28
4.1.1    Kependudukan .....	30
4.1.2    Pendidikan .....	31
4.1.3    Pemerintahan .....	33
4.1.4    Politik dan Pemilihan Presiden 2019.....	33
4.1.5    Agama & Organisasi Keagamaan di Jawa Barat.....	36
<b>BAB V PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>

5.1 Politik Identitas pada pemilu 2019 di Provinsi Jawa Barat.....	40
5.2 Polarisasi Agama pada pemilu 2019 di Provinsi Jawa Barat .....	46
5.3 Kerukunan Umat Beragama pada pemilu 2019 di Provinsi Jawa Barat .....	48
<b>BAB VI KESIMPULAN.....</b>	<b>55</b>
6.1 Kesimpulan.....	55
6.2 Rekomendasi .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>57</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Luas Daerah dan Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat .....	29
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk di Provinsi Jawa Barat .....	31
Tabel 4. 3 Sebaran agama yang dianut di Provinsi Jawa Barat .....	36
Tabel 5. 1 Indeks Toleransi di 9 Kabupaten/Kota di Jawa Barat.....	48
Tabel 5. 2 Penerimaan Gubernur dari Agama Lain .....	52

## DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

Gambar 1. 1 Struktur Otoritas Lembaga Keagamaan di Pulau Jawa.....	2
Gambar 4. 1 Piramuda Penduduk Provinsi Jawa Barat .....	30
Gambar 4. 2 Jumlah Desa/Kelurahan Masing-Masing Daerah di Jawa Barat.....	33
Gambar 5. 1 Dampak dari Pemilu yang tidak berintegritas	12
Grafik 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	32
Grafik 4. 2 Partisipasi Pemilu Jawa Barat Tahun 2019 .....	34
Grafik 4. 3 Partai Politik yang dipilih oleh Masyarakat Jika Pemilu diadakan pada saat ini ..	35
Grafik 4. 4 Kedekatan Masyarakat Jawa Barat dengan Partai Politik .....	35
Grafik 4. 5 Agama yang dianut oleh Masyarakat Jawa Barat versi Open Data.....	37
Grafik 5. 1 Pendapat Masyarakat Jawa Barat mengenai Demokrasi dan Islam	40
Grafik 5. 2 Pilihan Presiden berdasarkan Agama	41
Grafik 5. 3 Pendapat Masyarakat Presiden Harus Beragama Islam	41
Grafik 5. 4 Partisipasi Masyarakat Jawa Barat dalam Organisasi Keagamaan	43
Grafik 5. 5 Agama menjadi dasar dalam memilih Presiden	44
Grafik 5. 6 Penerimaan Presiden dari Agama Lain oleh Masyarakat Jawa Barat	47



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

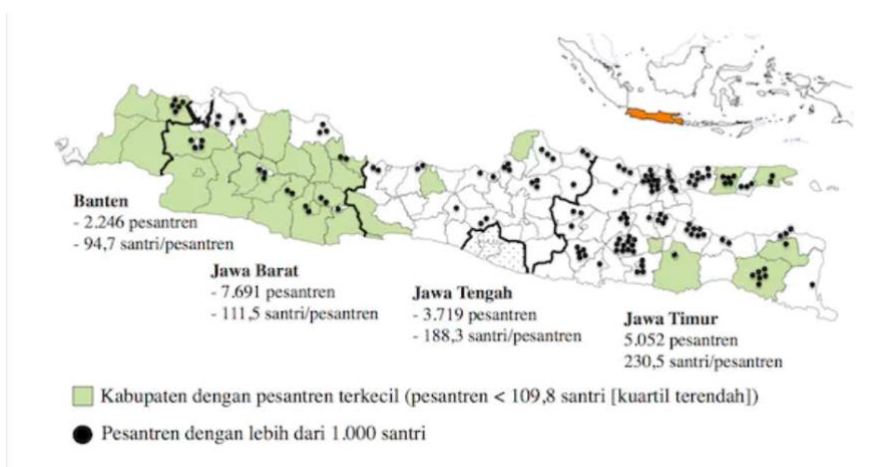
Pluralisme dapat menjadi potensi sekaligus ancaman bagi bangsa Indonesia. Hal tersebut dikarenakan bahwa sebagai negara majemuk yang dianugerahi keragaman budaya, potensi yang dimiliki oleh Indonesia untuk menjadi salah satu negara pemimpin dalam segi perekonomian, pembangunan sosial dan politik di Kawasan Asia maupun di kancah global menjadi sangat memungkinkan terjadi di masa depan. Namun, apabila potensi-potensi yang dimiliki tersebut tidak dapat dirawat dan dikembangkan secara optimal melalui pendekatan yang tepat, maka hal tersebut dapat menyebabkan kemunduran bagi bangsa dan negara. Tentunya, Keragaman budaya dan agama yang hidup rukun di dalam satu naungan bangsa menjadi salah satu karakteristik tersendiri bagi Indonesia sebagai negara pluralisme, negara yang terdiri dari beragam macam budaya dan agama yang mendiaminya, maka dari itu faktor agama dan budaya berperan sangat kuat, bahkan sejak masa awal kemerdekaan Indonesia.

Tantangan yang hadir dalam keragaman yang ada di Indonesia dapat berupa kapitalisasi unsur-unsur budaya maupun agama untuk memperoleh tujuan dari kepentingan politik, selain itu polarisasi keagamaan juga harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dalam isu kerukunan umat beragama karena dampak yang dihasilkan dari polarisasi unsur agama maupun budaya dapat memecah dan mengelompokkan kelompok-kelompok agama atau suku budaya tertentu untuk menjalankan kepentingan suatu kelompok dengan mengatasnamakan suatu kelompok agama maupun budaya tertentu.

Pengelompokan dari kelompok agama di Indonesia dapat mengakibatkan ketegangan-ketegangan sosial dan jarak diantara kelompok tersebut, sehingga berakibat kepada dikonstruksikannya nilai-nilai seperti kelompok “mayoritas” dan “minoritas”, dimana kepentingan kelompok dominan seakan mencerminkan sepenuhnya kepentingan masyarakat Indonesia. Polarisasi agama tersebut juga menjadi ancaman, salah satunya bagi Provinsi Jawa Barat, ketika mengetahui bahwa Jawa Barat merupakan Provinsi yang paling banyak memiliki kelompok Islam dan juga demonstrasi yang paling sering dilakukan dibandingkan dengan enam provinsi lainnya di Pulau Jawa. Dalam risetnya, Reynold mengemukakan bahwa tingkat demonstrasi dan kekerasan yang terjadi di Provinsi Jawa Barat mendekati angka 60 persen dari total kejadian yang ada di Pulau Jawa, terhitung sejak pada tahun 1998, yang tentunya angka tersebut dinilai lebih besar dibandingkan dengan provinsi- provinsi di Pulau Jawa lainnya. Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh riset yang dilakukan oleh William Reynold dalam *The Conversation* yang mengemukakan bahwa tumbuh kembangnya kelompok militan di Jawa Barat memiliki kaitan erat dengan kuatnya pengaruh dari kelompok Darul Islam sebagai salah satu kelompok dengan gerakan dan pemahaman yang cukup ekstrem, terutama

di Tahun 1942 dan 1962. Selain itu, dalam risetnya, Reynold lebih lanjut lagi mengemukakan bahwa kelompok militan yang ada di Jawa Barat tumbuh pesat di dalam lingkungan kepemimpinan muslim yang otoritas lembaganya lemah, seperti contoh yakni kelompok militan yang hadir di dalam lingkungan santri, dimana diketuai oleh kiai atau ustaz yang mengelola pesantren, kelompok pengajian, dan majelis taklim kecil (The Conversation, 2020)

Gambar 1. 1 Struktur Otoritas Lembaga Keagamaan di Pulau Jawa



Sumber: (William Reynold, 2014)

Dapat disimpulkan melalui gambar yang dikutip melalui *The Conversations* terkait dengan Penelitian disertasi William Reynold pada tahun 2014-2015 bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan angka pesantren paling tinggi se-Pulau Jawa dengan meraih total sebanyak 7.691 Pesantren pada masa periode tersebut. Meskipun begitu, jumlah santri per pesantren tidak lebih banyak, apabila dibandingkan dengan jumlah santri per pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hal tersebut dikarenakan luas atau ukuran pesantren di Jawa Barat yang relatif dua kali lebih sempit, apabila dibandingkan dengan ukuran pesantren di Jawa Timur. Maka dari itu, potensi dan ancaman polarisasi keagamaan di Provinsi Jawa dapat berdampak signifikan bagi kehidupan sosial dan politik, apabila merujuk kepada jumlah pesantren dan kelompok militan yang tumbuh di tataran akar rumput masyarakat Jawa Barat.

Selain itu, berdasarkan fenomena toleransi yang terjadi di Provinsi Jawa Barat, Riset yang dilakukan oleh *Indonesian Politics Research and Consulting (IPRC)* terkait dengan penelitian Indeks Toleransi di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 menemukan bahwa Indeks toleransi di Provinsi Jawa Barat berada pada tingkat menengah ke tinggi, dimana artinya potensi toleransi berada pada tingkatan sedang ke baik. Peluang untuk meningkatkan potensi toleransi relatif besar dan dapat dioptimalkan secara baik, namun kewaspadaan terhadap potensi munculnya perilaku intoleran harus tetap ditingkatkan. Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Setara Institut (2021), salah satu faktor meningkatnya perilaku intoleran adalah, kecilnya kelompok moderat dalam lingkup masyarakat beragama. Kelompok moderat

memiliki kecenderungan untuk dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan sosial, namun tidak melepaskan nilai-nilai agama yang dianutnya (Supriadi, Ajib, & Sugiarto, Intoleransi dan Radikalisme Agama: Konstruksi LSM tentang Program Deradikalisasi, 2020).

Berkaca pada tahun politik pemilu 2019 lalu, identitas agama menjadi ‘alat’ yang dipergunakan oleh aktor politik dalam mendapatkan suara pemilih (Ronaldo & Darmaiza, 2021). Penggunaan identitas agama dalam pemilu memiliki konsekuensi pada dinamika sosial masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial (Hivos), terdapat peningkatan kasus pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur sepanjang tahun 2019 hingga 2020. Laporan tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh SETARA Institut, dalam rentang tahun 2019 hingga 2020 terdapat lonjakan kasus pelanggaran KBB (CNN Indonesia, 2021). Kuatnya polarisasi agama dalam pemilu 2019 memberikan dampak yang cukup mengganggu terhadap dinamika sosial masyarakat, terlebih di Provinsi Jawa Barat.

Dampak yang dihasilkan oleh menguatnya politik identitas berbasis agama pada pemilu 2019 lalu, menjadi sebuah pelajaran bagi para *stakeholder* dalam menyambut tahun politik pemilu 2024, khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Barat untuk dapat mengantisipasi polarisasi agama di tatanan masyarakat. Terlebih Jawa Barat merupakan salah satu Provinsi yang kerap dihubungkan dengan rendahnya tingkat toleransi berbasis agama di tatanan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut kajian berjudul “Polarisasi dan Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Jawa Barat Menjelang Pemilu 2024” dirasa perlu untuk dilakukan.

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan kebutuhan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan, melakukan *monitoring*, koordinasi dan evaluasi dalam upaya mengantisipasi polarisasi dan meningkatkan kerukunan umat beragama maka dilakukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi polarisasi dan kerukunan umat beragama di Provinsi Jawa Barat?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab menguatnya polarisasi umat beragama di Jawa Barat?
3. Faktor-faktor apa saja yang menguatkan dan melemahkan kondisi kerukunan umat beragama?
4. Bagaimana proyeksi polarisasi dan kerukunan umat beragama menjelang pemilu 2024 di Provinsi Jawa Barat?

### **1.3 MAKSUD, TUJUAN DAN, SASARAN PENELITIAN**

#### **1.3.1. Maksud Penelitian**

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang utuh terkait kondisi polarisasi dan kerukunan umat beragama di Provinsi Jawa Barat. Kajian tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai pijakan serta rekomendasi terkait penyusunan, pelaksanaan, serta evaluasi program dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait isu polarisasi dan kerukunan umat beragama.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari disusunnya kajian mengenai isu polarisasi dan kerukunan umat beragama adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran yang utuh terkait kondisi polarisasi dan kerukunan umat beragama di Provinsi Jawa Barat.
2. Menghasilkan bahan kajian yang dapat dipergunakan sebagai landasan untuk menekan tingkat polarisasi umat beragama di Provinsi Jawa Barat.
3. Menghasilkan bahan kajian yang dapat dipergunakan sebagai landasan untuk menjaga serta meningkatkan situasi dan kondisi kerukunan umat beragama di Provinsi Jawa Barat.
4. Menghasilkan bahan kajian yang memproyeksikan kondisi polarisasi dan kerukunan umat beragama menjelang pemilu 2024 di Provinsi Jawa Barat.

#### **1.3.3. Sasaran**

Sasaran disusunnya penyusunan Kajian Tentang Polarisasi dan Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Jawa Barat adalah untuk sebagai berikut:

1. Adanya kajian terbaru mengenai kondisi polarisasi dan kerukunan umat beragama di Provinsi Jawa Barat.
2. Tersedianya rekomendasi kebijakan dan program untuk menekan tingkat polarisasi umat beragama di Provinsi Jawa Barat.
3. Tersedianya rekomendasi kebijakan dan program untuk menjaga serta meningkatkan situasi dan kondisi kerukunan umat beragama di Provinsi Jawa Barat.
4. Tersedianya bahan kajian yang memproyeksikan kondisi polarisasi dan kerukunan umat beragama menjelang pemilu 2024 di Provinsi Jawa Barat.

### **1.4 MANFAAT**

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat memahami dan dapat memproyeksikan situasi dan kondisi polarisasi dan kerukunan umat beragama menjelang pemilu 2024 di Provinsi Jawa Barat.
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dapat merumuskan kebijakan

dan program yang tepat terkait isu polarisasi dan kerukunan umat beragama di Provinsi Jawa Barat.

## **1.5 LANDASAN HUKUM**

- 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28E ayat (1);
- 2 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006. Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat;
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 – 441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 7 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 8 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;

## **1.6 RUANG LINGKUP**

### **6.1 Ruang Lingkup Wilayah**

Ruang lingkup wilayah dari pekerjaan jasa konsultasi kajian polarisasi dan kerukunan umat beragama, yaitu pada Provinsi Jawa Barat.

### **6.2 Ruang Lingkup Pekerjaan**

Lingkup pekerjaan terbagi atas beberapa tahapan yaitu:

- 1 Tahap konstruksi, berupa penyusunan instrumen, penentuan metode sampling, uji validitas dan reabilitas, serta FGD, diseminasi pakar dan praktisi.
- 2 Tahap lapangan, berupa pengumpulan data primer dan data sekunder serta input data.
- 3 Tahap coding dan cleaning data.
- 4 Tahap analisis data
- 5 Tahap penyusunan laporan.

## **1.7 KELUARAN**

Keluaran yang dihasilkan dari kajian polarisasi dan kerukunan umat beragama di Provinsi Jawa Barat adalah penilaian akademik terkait kondisi polarisasi dan kerukunan umat

beragama di Provinsi Jawa Barat yang dapat digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan, sekaligus melakukan koordinasi dan pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang berkaitan dengan isu polarisasi dan kerukunan umat beragama.

### **1.8 KUALIFIKASI PERSONIL**

Tenaga Ahli yang diperlukan dalam pekerjaan ini adalah Ahli di Bidang Politik, Pemerintahan, Kebijakan Publik dan Hukum yaitu konsultan profesional perorangan dengan jenjang pendidikan minimal S2 (Magister Politik/Pemerintahan/Kebijakan Publik/Hukum) dan mempunyai latar belakang pengalaman di bidangnya minimal 2 tahun

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Polarisasi

Teori mengenai polarisasi merupakan teori yang berada didalam spektrum yang luas, bersangkutan dengan teori-teori lainnya seperti teori sosial politik, etnik, dan kemasyarakatan. Perdebatan panjang terjadi dalam masa pembahasan polarisasi, sehingga definisi mengenai polarisasi ini menjadi cukup beragam dan luas. Akan tetapi, jika kita berbicara mengenai polarisasi dan demokrasi, maka pembahasan tersebut menjadi semakin sempit, dengan kata lain *undertheorized* atau belum menjadi pembahasan yang banyak dibahas oleh banyak *scholar*. Talisse dalam (Sharp, 2022) mengemukakan bahwa akar permasalahan dari munculnya fenomena polarisasi adalah gagasan dari demokrasi yang mendorong adanya keadilan dan melihat seluruh elemen masyarakat setara atau *equal*, dimana masyarakat banyak menuntut didalam demokrasi, mulai dari tuntutan masyarakat akan keadilan, dukungan terhadap pandangan masing-masing kelompok yang harus dipenuhi, dan perlakuan setara terhadap masing-masing kelompok masyarakat. lebih lanjut lagi, Talisse mengemukakan beberapa pengertian dari polarisasi yang diantaranya:

1. Polarisasi Politik. Dalam pengertiannya, Polarisasi politik terjadi ketika terdapat perbedaan pemikiran ideologi antara kelompok-kelompok masyarakat, khususnya kelompok politik. Polarisasi politik dapat diartikan sebagai jarak diantara kelompok politik, maupun perilaku negatif masyarakat ketika berhadapan dengan pihak oposisi.
2. Polarisasi Kepercayaan. Talisse mengemukakan bahwa Polarisasi kepercayaan merupakan proses yang terjadi diantara suatu kelompok; interaksi diantara sekelompok orang yang memiliki ciri perilaku yang sama, sehingga menghasilkan tiap-tiap anggotanya mengadopsi perilaku ekstrem berdasarkan *shared vision* atau pandangan yang sama didalam kelompok tersebut. Proses ini terjadi didalam kelompok homogen yang didorong oleh apa yang dinamakan dengan *perceived corroboration* atau membenaran yang dirasakan, dimana membenaran tersebut dilakukan oleh teman anggotanya, sehingga menimbulkan dampak terhadap rasa senang terhadap perilaku ekstrem yang dijalankan karena sejalan dengan kepercayaan yang diamini oleh bersama dan membuat pelaku merasa diakui sebagai bagian dari suatu kelompok atau suatu identitas sosial yang dimiliki oleh suatu kelompok. Berangkat dari gagasan tersebut, perilaku radikal berpotensi tinggi dilakukan.

Tentunya diantara kedua jenis polarisasi ini, keduanya berkaitan dengan satu sama lain. Keduanya bekerja didalam proses yang dinamakan *dynamic polarization* atau dinamika polarisasi yang berakar didalam proses demokrasi maupun demokratisasi. Dimana alur tersebut bermula dari gagasan demokrasi yang mengharuskan masyarakatnya untuk mendorong keadilan sosial, dimana keadilan sosial tersebut membutuhkan aliansi politik yang terdapat

didalam kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki pemikiran serta perilaku khas yang sama. Disitulah bermula polarisasi keyakinan berjalan.

### 2.1.1 Agama dan Polarisasi

Agama menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya polarisasi di masyarakat, hal tersebut dikarenakan kelompok-kelompok agama di masyarakat yang memiliki peranan kuat dan mengikat, sehingga polarisasi yang terjadi berdasarkan dampak dari kelompok agama di masyarakat dapat dikatakan cukup tinggi bahkan sejak dalam masa *dark ages*. Terutama di Indonesia, kelompok agama di Indonesia merupakan kelompok yang sangat massif dan memiliki peranan sentral dalam menentukan kebijakan serta dinamika politik negara. Namun, diskusi mengenai polarisasi merupakan diskusi multi-dimensi yang tidak hanya berbicara mengenai “*culture war*” atau perang budaya maupun fragmentasi, tetapi juga diskusi ini membutuhkan pantauan khusus dari berbagai perilaku, keyakinan, dan pertukaran norma dari generasi ke generasi. Inglehart dan Baker dalam (Perry, 2022) mengemukakan bahwa warisan keagamaan berperan besar dalam membentuk poros dalam polarisasi masyarakat dan ketentuan-ketentuan mana saja yang tidak disetujui. Lebih lanjut lagi, Perry menjelaskan pembahasan mengenai polarisasi dan agama melalui tiga level analisis yang terdiri dari level makro, meso, dan mikro. Berikut gambaran umum mengenai tiga level analisis tersebut:

1. **Level Makro.** Dimensi agama merupakan dimensi yang menyatukan seluruh level dari analisis politik. Grzymala-Buss dalam (Perry, 2022) Dimensi agama mempengaruhi urusan negara dalam tingkat yang lebih luas dan beragam seperti pada pemilihan umum dan elit politik, kebijakan dan hukum, pengangkatan hakim, identitas nasional, dan sebagainya.
2. **Level Meso.** Selain pada tingkat makro dan mikro, agama juga mempengaruhi berbagai aspek pada tingkatan meso atau pada tingkatan yang mempengaruhi unit-unit kecil hingga menengah di dalam masyarakat yang berkaitan dengan tingkatan makro. Pierson & Schickler (2020) dan Mayrl (2018) dalam (Perry, 2022) mengambil salah satu contoh pengaruh agama di tingkatan meso adalah analisis mengenai peradilan dalam kebebasan beragama. Maryl mengemukakan bahwa pengadilan bukan merupakan aktor yang independen, melainkan aktor yang secara prosedural dibebani tanggung jawab untuk menegakkan hukum yang sifatnya rigid. Akan tetapi, peradilan berada di dalam ekosistem yang sama dengan institusi politik lainnya maupun Lembaga lainnya yang dapat mempengaruhi, bekerja sama, ataupun melawan upaya dari peradilan tersebut untuk membentuk suatu peraturan dalam hal yang berkaitan dengan keagamaan.
3. **Level Mikro.** Agama mempengaruhi polarisasi hingga ke tingkat mikro seperti sekolah, kelompok keagamaan/ jemaat. Agama mempengaruhi melalui identitas keagamaan, lembaga keagamaan, bahkan hingga ke ideologi politik. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diteliti oleh Boussalis (2021), Djupe & Gilbert (2003), Uecker



& Lucke (2011) dalam (Perry, 2022) bahwa ulama atau pemuka agama berperan cukup signifikan dalam polarisasi keagamaan khususnya dalam mempengaruhi dan membentuk sikap dan perilaku politik jemaatnya.

Maka dari itu, agama merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya polarisasi di masyarakat. Selain dikarenakan kesamaan dalam perilaku dan norma yang berlaku dan dipahami, agama juga dapat menjadi sarana atau alat dalam mengotak-otakkan masyarakat karena pengaruhnya yang kuat di dalam tingkat makro, meso, dan mikro. Terutama di Indonesia, sebagai negara multikultural dengan banyaknya etnik, ras, dan agama di bawah satu naungan NKRI. Potensi polarisasi sangat tinggi terjadi di Indonesia, bahkan dapat menjadi senjata politik untuk menjatuhkan atau bahkan mengeliminasi lawan politik di dalam kontestasi politik seperti Pemilihan Umum dan perancangan Undang-Undang Nasional. Jika tidak berhati-hati, Polarisasi dapat melemahkan demokrasi di Indonesia, hal tersebut dikarenakan kesetaraan dan keadilan sulit tercapai apabila polarisasi berdampak negatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

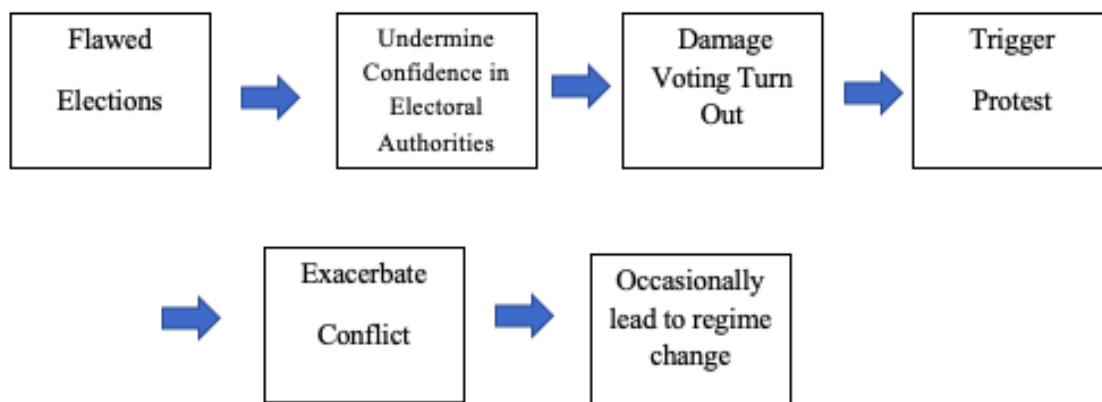
### **2.1.2 Polarisasi secara kepemiluan**

Polarisasi keagamaan dan kerukunan umat beragama sangat berdampak secara signifikan terhadap kegiatan-kegiatan politik salah satunya yakni pemilihan umum legislatif dan presiden. Secara kepemiluan, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, faktor tersebut dikemukakan oleh Dr. Asrinaldi, Dekan FISIP Universitas Andalas. Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh beliau dalam kuliah umum yang bertajuk “Seminar Tata Kelola Pemilu-Tantangan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024”, Dr. Asrinaldi mengemukakan bahwa dinamika masyarakat sebagai pemilih dicirikan ke dalam beberapa faktor penyebab yang diantaranya yakni (Dr. Asrinaldi, 2022):

1. Budaya politik subjektif masih dominan diantara masyarakat;
2. Pendidikan politik masyarakat yang masih rendah;
3. Patronase yang masih kuat, sehingga mobilisasi dengan materi seperti uang, hadiah, batuan, dan sebagainya masih dominan;
4. Akses masyarakat ke dalam informasi pemilu yang masih terbatas.

Pemilu yang berintegritas menjadi penting bagi seluruh pihak tentunya untuk mencegah terjadinya polarisasi dan konflik yang terjadi pada masa pemilihan umum. Dilansir pada kesempatan yang sama, Dra. Mudiwati, selaku Kepala Program Studi Ilmu Politik Magister FISIP Unpad, mengemukakan bahwa pemilu yang berintegritas dapat menghasilkan hasil kepemiluan yang kredibel, sehingga dapat melegitimasi pejabat politik terpilih dalam proses pemilihan umum tersebut. Selain itu, beliau lebih lanjut lagi mengemukakan bahwa, seperti apa yang dikutip oleh Norris (2014) dalam (Dra. Mudiwati Rahmatunisa, 2022) mengemukakan bahwa terdapat tahapan-tahapan yang dapat dihasilkan dari pemilu yang tidak berintegritas yang diantaranya yakni sebagai berikut:

Gambar 5. 1 Dampak dari Pemilu yang tidak berintegritas



Sumber: (Dra. Mudiwati Rahmatunisa, 2022)

Secara garis besar, pemilu yang tidak juberdil atau dipenuhi oleh kecurangan dan kebohongan (*flawed elections*), disebabkan oleh hal tersebut maka akan menyebabkan ketidakpercayaan terhadap pengelola dan penyelenggara pemilu (*Undermine confidence in electoral authorities*). Ketidakpercayaan terhadap penyelenggara pemilu tersebut disebabkan oleh perilaku dan Tindakan-tindakan manipulatif dari berbagai pihak yang kemudian menghasilkan apa yang dimaksud dengan *Damage Voting Turn Out* yang tercermin dalam ketidakpercayaan masyarakat dalam hasil yang ditentukan. Ketidakterimaan masyarakat tersebut akan memicu protest atau *trigger protest* yang berujung kepada polarisasi dan konflik antar kelompok pendukung. Protest yang dilayangkan kepada hasil penetapan pemilu dapat memperbesar konflik atau *exacerbate conflict* dan pada akhirnya dapat menyebabkan perubahan rezim atau *occasionally lead to regime change*.

## 2.2 Kerukunan Umat Beragama

Dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, kerukunan diantara umat beragama menjadi suatu asas fundamental bagi terciptanya situasi dan kondisi perdamaian dan kedamaian di Indonesia. Hal tersebut menjadi penting karena Indonesia, sebagai negara multi kultur dan multi agama, Toleransi menjadi syarat utama yang terus berusaha dibangun dalam wacana kerukunan diantara umat beragama di Indonesia. Apabila menilik jauh secara historis, Indonesia mengakui lima agama yang diantaranya yakni Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, Budha dan Hindu, hal tersebut terjadi pada masa Orde Baru, dimana pengakuan atas lima agama tersebut penting dalam mencegah dicapnya seseorang menjadi bagian dari komunisme. Hal tersebut diperkuat dengan tulisan dari E. Armada Riyanto (2020) dalam (Khoirul Fatih, 2017) bahwa dengan adanya tuntutan bagi masyarakat untuk menganut suatu agama tertentu, terlepas dari diakuinya lima agama resmi di Indonesia, tiap-tiap kelompok agama berusaha melakukan misi agama, yang dikenal seperti Islamisasi, kristenisasi, dan sebagainya, untuk meraup jemaat sebanyak-banyaknya dengan klaim bahwa kelompok agam tersebut merupakan

agama yang paling benar. Misi agama yang dijalankan oleh masing-masing kelompok tersebut menyebabkan persinggungan diantara kelompok-kelompok agama terutama Islam dan Kristen, sehingga kondisi tersebut menyebabkan kondisi ketidakharmonisan diantara keduanya. Berangkat dari latar belakang tersebut, diskursus mengenai sebuah proyek kerukunan umat Beragama pun dimulai. Diinisiasi oleh berbagai pihak seperti Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Lembaga Akademik pada Tahun 1960an, proyek kerukunan umat beragama mengalami perkembangan yang signifikan di tiap-tiap tahunnya. Berawal dari sebatas dialog di dalam ruang lingkup pemuka agama kemudian berkembang menjadi dialog yang serius di kalangan Lembaga yang kemudian diinstitutionalimekan menjadi lebih baik lagi.

### 2.2.1 Multikulturalisme

Indonesia merupakan negara multikultural, dimana secara harfiah, multi merupakan definisi dari beragam, dan kultur dapat didefinisikan sebagai budaya, adat, agama yang menjadi identitas seseorang. Tentunya, multikulturalisme erat berkaitan dengan budaya, dimana Indonesia menjadi tuan rumah bagi beribu-ribu budaya dan beragam agama yang mendiaminya. Greetz (1973) dalam (Budiyono et al., 2018) mengemukakan budaya merupakan sebuah jalan atau simbol yang digunakan oleh seluruh anggota di dalam kelompok tersebut untuk saling mengerti satu sama lain, terkait siapa mereka dan memberikan mereka arti dalam hidupnya. Keberagaman yang ada di Indonesia tentunya dapat dilihat melalui kepulauan Indonesia yang terdiri dari kurang lebih 16.766 pulau dengan 300 lebih kelompok etnik atau suku bangsa yang terdiri dari 1.340 suku bangsa di tanah air. Suku Jawa merupakan suku yang paling banyak terdapat di Indonesia dengan perolehan sebanyak 41 persen dari total populasi. (Indonesia.go.id, n.d.).

Parekh (1997) dalam (Budiyono et al., 2018) menjabarkan bahwa terdapat lima model dari multikulturalisme yakni diantaranya:

1. Multikulturalisme yang solutif. Model ini didefinisikan sebagai masyarakat kelompok sosial yang menjalani hidupnya secara masing-masing, dengan meminimalkan interaksi mereka dengan satu sama lain,
2. Multikulturalisme yang akomodatif. Pada model ini, masyarakat memiliki budaya dominan dan membuat penyesuaian tertentu dan akomodatif terhadap budaya minoritas. Dalam model ini, masyarakat membuat sebuah ketentuan dan hukum yang melindungi kaum minoritas untuk memberikan mereka kebebasan untuk menjalankan dan mengembangkan kebudayaannya.
3. Otonomi Multikulturalisme. Model ini didefinisikan sebagai kelompok masyarakat plural yang berupaya untuk merealisasikan kesetaraan untuk budaya dominan dan menginginkan kehidupan yang otonom dalam kerangka politik yang sewajarnya.
4. Multikulturalisme yang Interaktif. Model ini merujuk kepada masyarakat plural, yang dimana, mereka tidak dibutuhkan untuk fokus kepada kehidupan berbudaya mereka

yang otonom, melainkan cenderung untuk membentuk refleksi kolektif dari perspektif unik mereka

5. Multikulturalisme Kosmopolitan. Model ini didefinisikan sebagai masyarakat plural yang mencoba untuk mengeliminasi batas-batas budaya untuk membentuk suatu masyarakat yang secara individu tidak terikat dengan budaya tertentu dan memiliki kebebasan untuk terikat dengan pengalaman diluar budaya mereka, sama halnya dengan mengembangkan kehidupan berbudaya mereka.

maka dari itu, kesimpulan yang dapat diambil dalam kelima model tersebut adalah multikulturalisme sebagai reduksi batas-batas yang secara sosiologi tercipta untuk mengotakkan satu dengan kelompok lainnya. Batas-batas tersebut menciptakan jurang perbedaan menjadi semakin besar, dan kelompok yang percaya dan memahami multikulturalisme tersebut ingin menghapus Batasan-batasan tersebut dengan menegakkan kebebasan untuk individu dalam melakukan apa yang diinginkannya. Hal tersebut juga sejalan dengan argumen yang dikemukakan oleh Budiyono dkk bahwa konflik yang terjadi pada struktur masyarakat yang multikultural biasanya mengatasnamakan identitas kelompok yang hadir sebagai bentuk ketakutan berlebih terhadap suatu perbedaan. Lebih lanjut lagi, Budiyono, dkk mengemukakan bahwa konsep dari Multikulturalisme menegakkan keberagaman dan memelihara keberagaman tersebut untuk tetap hadir dan berkembang secara dinamis. Hal tersebut dikarenakan konsep dari Multikulturalisme yang menjunjung manusia dan haknya sebagai pemikiran yang universal, atau dengan kata lain, manusia adalah setara dengan satu dan lainnya. Maka dari itu, dengan adanya Multikulturalisme, keberagaman dapat menjadi peluang manifestasi dalam mengembangkan dialog dan komunikasi.

Bhinneka Tunggal Ika merupakan contoh nyata dari hasil buah pemikiran multikulturalisme yang diwadahi oleh gagasan politis berkebangsaan. Bhinneka Tunggal Ika merupakan warisan bangsa untuk tetap mengingatkan seluruh masyarakat bahwa ‘meskipun berbeda-beda, tapi tetap satu jua’ atau yang sering kita sebut sebagai ‘*unity in diversity*’. Istilah simbolik ini sering kali dilupakan oleh masyarakat yang terkesan diskriminatif terhadap perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing kelompok. Maka dari itu, konflik rentan terjadi, khususnya konflik antar umat beragama di Indonesia. Konsep Bhinneka Tunggal Ika haruslah mendorong dialog, *mutual respect*, dan toleransi berkembang di Indonesia karena konsep tersebut merupakan konsep yang diakui dan menjadi asas-asas dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fitch (2011) dalam (Nurhayati et al., 2021) mengemukakan lima panduan dalam menjalankan Bhinneka Tunggal Ika sebagai sebuah konsensus nasional, yang diantaranya:

1. Menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keamanan negara dan bangsa diatas kepentingan kelompok atau pribadi,
2. Kemauan untuk berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa,

3. Mencintai Tanah air dan masyarakat Indonesia,
4. Bangga menjadi orang Indonesia dan tinggal di Indonesia,
5. Mendorong komunikasi untuk persatuan dan kesatuan untuk bangsa di dalam keberagaman.

Tujuan dari istilah “Bhinneka Tunggal Ika” merupakan istilah yang mengakar kuat secara historis dan nilai-nilai kearifan Indonesia. Berawal dari gagasan yang muncul dari jaman Majapahit, istilah Bhinneka Tunggal Ika mengindikasikan semangat dari toleransi beragama yang nantinya berkembang menjadi moto dari bangsa Indonesia. Tidak hanya sebatas toleransi beragama, gagasan tersebut menjadi lebih besar melebihi itu, yakni toleransi terhadap seluruh SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan). Keberagaman dan keunikan sebagai kenyataan yang dimiliki oleh masyarakat serta lingkungan yang sama halnya dengan aspirasi untuk membangun bangsa diformulasikan ke dalam istilah dari Bhinneka Tunggal Ika. (Nurhayati et al., 2021)

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Astuti, Dkk dalam (Nurhayati et al., 2021), bahwa perilaku dan prinsip dalam keberagaman sebagai konsensus nasional dalam kehidupan sosial di era 4.0 idealnya adalah sebagai berikut:

1. Hidup dalam harmoni dengan satu sama lain sebagai bentuk dari mutual toleransi
2. Adil dan tidak diskriminasi kepada seseorang berdasarkan dengan perbedaan dasar dan status seperti perbedaan etnik dan agama
3. Menolong sesama yang dilakukan dengan keikhlasan
4. Mengapresiasi dan menghargai sesama manusia tanpa mendegradasi harga diri seseorang
5. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan tanah air Indonesia, seperti upaya mempertahankan negara
6. Menggunakan media massa secara luas
7. Memperkenalkan nilai dari persatuan di dalam berbagai aktivitas dan memperkenalkan era globalisasi
8. Dapat membedakan pengaruh positif dan negatif dari perkembangan era 4.0 dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
9. Berpartisipasi dengan tujuan untuk *me-maintain* persatuan moral bangsa, dan mengajak masyarakat lainnya untuk berpartisipasi untuk mencegah budaya negatif dari pengaruh dari perkembangan era 4.0

### **2.2.2 Model Kerukunan Umat Beragama ala Mukti Ali**

Prof. Mukti Ali merupakan seorang pemikir Islam yang sempat menjabat sebagai Menteri Agama menggantikan KH. M. Dahlan pada Kabinet Pembangunan I dan II. Beliau merupakan penggagas dari model kerukunan umat beragama di Indonesia. Gagasannya yang populer tersebut merupakan warisan bagi kekayaan pemikiran kerukunan umat beragama di

Indonesia dan juga memperkuat dikursus kerukunan dan keharmonisan di dalam perbedaan yang terus digemakan hingga saat ini.

Model kerukunan umat beragama pertama kali digagas oleh Prof. Mukti Ali ketika beliau menjabat menjadi Menteri Agama Indonesia pada tahun 1971-1978. Model kerukunan tersebut pertama kali diimplementasikan di dalam departemen agama dengan berlandaskan prinsip keadilan Islam yang percaya akan tiga poin yakni; kebebasan hati Nurani secara mutlak, persamaan kemanusiaan secara sempurna, dan solidaritas dalam pergaulan yang kokoh (Husin Khairah, 2014). Selain tiga poin diatas, Husin dalam jurnalnya juga mengemukakan bahwa gagasan mengenai *agree in disagreement* merupakan salah satu gagasan terkenal yang dikemukakan oleh Prof. Mukti Ali, dimana gagasan tersebut merupakan awal mula berkembangnya konsep dari ‘Kerukunan Hidup Antar umat Beragama’ di Indonesia.

Selanjutnya, model ‘Kerukunan Hidup Antar umat Beragama’ kemudian berkembang dan menghasilkan gagasan inti dalam bagaimana untuk memperkuat dan memperkuat solidaritas diantara umat beragama. Prof. Mukti Ali dalam (Husin Khairah, 2014) menjabarkan lebih lanjut terkait dengan konsep dari model ‘Kerukunan Hidup Antar umat Beragama’ yang diantaranya yakni:

1. Pentingnya menjaga kerukunan antar umat seagama. Gagasan Prof. Mukti Ali tersebut menjadi penting disimak karena urgensi dari karakteristik umat beragama di Indonesia yang sangat majemuk dan plural. Prof. Mukti ali mengemukakan bahwa, untuk umat Islam tersebut, umat muslim di Indonesia terdiri dari berbagai spektrum atau kecenderungan mengikuti suatu mazhab seperti diantaranya NU, Muhammadiyah, Masyumi, DDII, dan yang sebagainya. Tentunya, hal tersebut juga terjadi untuk agama lainnya, seperti Kristen dan Katolik yang memiliki perbedaan golongan di dalam satu entitas keagamaan. Jika kotak-kotak di agama tersebut tidak dikelola dengan baik, maka hal tersebut dapat berpotensi menjadi konflik di dalam tubuh suatu kelompok keagamaan.
2. Pentingnya menjaga kerukunan antar umat beda agama. Hidup di dalam masyarakat dengan karakteristik majemuk, menjaga kerukunan antar umat beragama merupakan suatu keharusan dengan tujuan untuk membangun harmonisasi dan kedamaian dalam menjalani kehidupan bernegara. Dalam historis Indonesia, konflik yang terjadi antara umat beda agama kerap terjadi, salah satunya yakni konflik Ambon dan Poso yang gagal dimediasi oleh pemerintah.
3. Pentingnya membina hubungan umat beragama dengan Pemerintah. Hal tersebut menjadi penting untuk menjaga keharmonisan serta kedamaian dalam beragama, mengingat bahwa Indonesia bukan negara teokrasi dan juga bukan

negara sekuler. Indonesia merupakan negara yang mengakui lima agama resmi dan menghormati segala praktik dari agama-agama tersebut.

Dasar-dasar pemikiran tersebut merupakan awal mula dari lahirnya Trilogi Kerukunan Umat Beragama yang diteruskan oleh penerus dari Prof. Mukti Ali yakni Alamsyah Ratu Prawiranegara. Trilogi tersebut merupakan konsep yang sering diajarkan oleh sistem pendidikan Indonesia, mulai dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi dengan tujuan agar Trilogi Kerukunan Umat Beragama tersebut dapat ditanamkan ke dalam anak cucu bangsa sejak dini.

Pemikiran Prof. Mukti Ali juga tidak sampai pada Trilogi Kerukunan Umat Beragama, Prof. Mukti Ali juga banyak berbicara mengenai pluralisme agama. Pluralisme agama sendiri merupakan sebuah keyakinan dan pengakuan terhadap agama lainnya, tanpa kemudian masuk ke dalam pemahaman yang sama diantara agama-agama tersebut. Hal tersebut juga sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Prof. Mukti Ali dalam (Husin Khairah, 2014) bahwa titik dasar dari pluralisme agama sendiri adalah mengakui adanya pluralisme agama, atau dengan kata lain, mengakui dan menghormati adanya perbedaan agama di dalam masyarakat tanpa kemudian menganggap bahwa semua agama memiliki pemahaman yang sama. hal tersebut dikarenakan bahwa agama, secara teologis, merupakan sesuatu yang tidak dapat dikompromikan. Nilai yang terdapat di dalam agama merupakan nilai absolut dan tetap, meskipun di dalam suatu struktur masyarakat plural, sudut pandang keagamaan pasti berbeda dengan satu sama lainnya seperti contoh kepercayaan terhadap Nabi Isa yang sangat berbeda diantara kedua sudut pandang agama Islam dan Kristen. Jadi, kesimpulan yang dapat diberikan adalah bahwa secara sosiologis, masyarakat memiliki keimanan dan kepercayaan masing-masing. Secara teologis, kebenaran adalah bersumber kepada pemahaman dari agama masing-masing.

Prof. Mukti Ali mengemukakan lima buah pemikiran yang dapat membantu dalam mencapai kerukunan dalam kehidupan beragama yang diantaranya yakni terdiri dari:

1. Sinkretisme, yakni pemahaman bahwa semua agama adalah sama,
2. *Reconception*, yakni melakukan pendalaman terhadap kepercayaan masing-masing dalam melakukan konfrontasi dengan agama-agama lainnya,
3. *Sintetis*, yakni menciptakan suatu agama dari yang lahir dari konsep-konsep yang diambil dari agama-agama lain dengan tujuan agar tiap-tiap pemeluk agama merasa bahwa Sebagian dari agamanya telah diambil ke dalam agama sintetis,
4. Penggantian, yakni merupakan suatu pemahaman bahwa agama yang dianut merupakan agama yang paling baik dan benar, sedangkan agama lain memiliki pemikiran yang salah, maka dari itu proses penggantian agama seperti Islamisasi maupun kristenisasi berjalan,

5. *Agree in disagreement*, yakni merupakan pemikiran populer dimana tiap individu percaya bahwa agama yang dipeluknya merupakan agama yang paling baik, tetapi disisi lain mempersilahkan orang lain untuk percaya bahwa agama yang dipeluknya merupakan agama yang paling baik juga.

Diantara kelima buah pemikiran diatas, tentunya konsep dari *agree in disagreement* menjadi pemikiran yang paling disetujui oleh Prof. Mukti Ali dan dipercaya merupakan pemikiran yang paling cocok dalam membangun keharmonisan diantara umat beragama. Maka dari itu, konsep *agree in disagreement* berkembang menjadi apa yang kita sebut sebagai pemikiran dalam Kerukunan Umat Beragama di Indonesia, dimana kita percaya akan kebaikan dari agama yang kita anut, namun juga kita tidak menjadi diskriminatif atau mengotak-otakkan diri menjadi berbagai kelompok agama yang saling bertentangan antara satu sama lain, melainkan mempersilahkan individu yang menganut agama lain juga memiliki pemikiran seperti itu bahwa agama yang dianutnya juga merupakan agama yang paling baik.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Desain Penelitian

Penelitian Polarisasi dan Kerukunan Umat Beragam di Provinsi Jawa Barat Menjelang Pemilu 2024, bertujuan untuk, (i) memberikan gambaran yang utuh terkait kondisi polarisasi dan kerukunan umat beragam di Provinsi Jawa Barat; (ii) Menghasilkan bahan kajian yang dapat dipergunakan sebagai landasan untuk menekan tingkat polarisasi umat beragama di Provinsi Jawa Barat; (iii) Menghasilkan bahan kajian yang dapat dipergunakan sebagai landasan untuk menjaga serta meningkatkan situasi dan kondisi kerukunan umat beragama di Provinsi Jawa Barat; (iv) Menghasilkan bahan kajian yang memproyeksikan kondisi polarisasi dan kerukunan umat beragama menjelang pemilu 2024 di Provinsi Jawa Barat. Maka dari itu, desain penelitian menjadi sangat penting untuk menghasilkan validitas data dalam rangka menghadirkan ketersediaan data yang akurat yang dijelaskan secara komprehensif.

Desain penelitian menjadi krusial di dalam kajian ini, hal tersebut dikarenakan setiap hasil data yang dihimpun dan diolah oleh Tim Peneliti diharapkan dapat berkontribusi dalam menciptakan kerukunan umat beragama di Provinsi Jawa Barat menjelang pemilu 2024, melalui rekomendasi-rekomendasi serta hasil data yang dihasilkan di dalam kajian ini. Kajian ini bertolak dari fenomena yang terjadi pada saat pemilu 2019 lalu, dimana politisasi agama marak dilakukan oleh aktor politik dalam berkontestasi dalam pemilu, sehingga memberikan dampak terhadap polarisasi agama yang terjadi pada tatanan masyarakat, lebih jauh, perilaku intoleran juga menjadi perhatian utama. Eksplorasi makna serta teori yang dikaji di dalam penelitian ini dapat membantu Tim Peneliti untuk menjawab berbagai pertanyaan yang muncul serta rumusan permasalahan terkait, bagaimana kondisi polarisasi dan kerukunan umat beragama, serta proyeksinya menjelang pemilu 2024 di Provinsi Jawa Barat.

Pengumpulan satu basis data sekunder yang diperlukan dalam kajian ini sangat penting dilakukan. Basis data tersebut dapat membantu menjelaskan basis data lainnya, serta membantu eksplorasi pertanyaan-pertanyaan penelitian, sehingga mampu menjawab rumusan masalah penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mix-methods*. Matthews dan Ross (Matthews & Ross, 2010, pp. 142-144) mengemukakan bahwa *mix-methods* dapat menjadi kombinasi terbaik untuk proyek penelitian tertentu karena menggabungkan antara metode kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan *mix-methods* memilih metode koleksi data, atau *collect data*, berdasarkan rumusan permasalahan yang dapat dijawab menggunakan dua tipe data, yakni data kualitatif dan data kuantitatif. Dalam pendekatan ini, kadang terdapat pertanyaan di dalam rumusan permasalahan yang membutuhkan perspektif dari data kualitatif dan juga kadang kala membutuhkan data kuantitatif untuk mendukung argumentasi dari jawaban rumusan

permasalahan yang di kaji oleh Peneliti. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa dalam kajian ini, dua tipe data yang dikumpulkan, yakni data kuantitatif atau data statistik yang didapatkan melalui sumber seperti Badan Pusat Statistik serta sumber-sumber lainnya, dan data kualitatif yang dikumpulkan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) bersama para *expertise*, serta elemen masyarakat sebagai *stakeholder* yang berhubungan dengan bidang polarisasi dan kerukunan umat beragama.

### 3.2 Tahapan Penyusunan Data

Penyusunan Data Dasar kajian Polarisasi dan Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Jawa Barat Menjelang Pemilu 2024, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut,

1. Pertama, Tahap Konstruksi yang berbentuk diskusi dan diseminasi guna mendapatkan kesepahaman serta kerangka kerja dan gambaran umum mengenai data dasar yang dibutuhkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat.
2. Kedua, Pengumpulan data. Pengumpulan data primer dan sekunder yang dilakukan dengan metode: Studi literatur, studi dokumen, dan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk mendapatkan gambaran mengenai isu polarisasi dan kerukunan umat beragama di Provinsi Jawa Barat, serta menentukan teori yang relevan dan sesuai.
3. Ketiga, Analisis Data. Dalam tahapan ini, data yang telah terkumpul, baik primer maupun sekunder, dianalisis dan dilakukan pendalaman atas temuan berdasarkan data tersebut. Setelah itu, dilakukan interpretasi atas temuan-temuan dari data tersebut.
4. Keempat, Tahap penyusunan laporan.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan di dalam penelitian ini meliputi studi literatur, studi dokumen, *Focus Group Discussion* (FGD), dan wawancara untuk mendapatkan gambaran mengenai isu polarisasi dan kerukunan umat beragama di Provinsi Jawa Barat. Adapun data-data yang dikumpulkan terdiri dari dua jenis, diantaranya,

#### 3.1.1 Data Primer

Data Primer disusun dan dikumpulkan melalui *Focus Group Discussions* (FGD) dan wawancara mendalam kepada para *expertise* dan *stakeholder* di Provinsi Jawa Barat. Pedoman wawancara serta panduan FGD dibuat di dalam format pemaparan temuan dari data sekunder terlebih dahulu oleh Tim Peneliti, disusul dengan pemaparan serta tanggapan dari para *expertise* dan *stakeholder* di Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut merupakan bentuk *cross check* atas temuan-temuan awal tim peneliti, sehingga dapat memberikan temuan yang utuh atas suatu fenomena.

#### 3.1.2 Data Sekunder

Data sekunder berperan sebagai data pendukung serta basis data penelitian terkait dengan polarisasi dan kerukunan umat beragama di Provinsi Jawa

Barat, yang berguna untuk menjelaskan data lainnya. Data tersebut dapat berupa dokumen-dokumen penelitian, laporan, atau bentuk lainnya yang mendukung penelitian.

### 3.4 Teknik Analisis Data

Creswell dan Clark dalam (Onwuegbuzie & Combs, 2011, pp. 4-7) mengemukakan bahwa analisis data dalam pendekatan *mix-methods* dimulai dari menganalisis data kuantitatif menggunakan metode kuantitatif dan menganalisis data kualitatif menggunakan metode kualitatif. Lebih lanjut lagi, Onwuegbuzie dan Teddlie dalam (Onwuegbuzie & Combs, 2011) mengemukakan bahwa konseptualisasi analisis data pendekatan *mix-methods* terdiri dari tujuh tahap, yakni sebagai berikut,

- a) Reduksi Data. Setelah data primer dan sekunder yang dikumpulkan, data-data tersebut direduksi secara dimensional antara data kuantitatif dan data kualitatif untuk menemukan data mana yang relevan dan dibutuhkan terkait kajian ini.
- b) *Display Data*. Data yang telah direduksi diatas, dijabarkan secara visual antara kedua data yakni data kuantitatif dan kualitatif.
- c) Transformasi Data. Setelah data dijabarkan secara visual, data tersebut kemudian ditransformasikan secara masing-masing dimensi, yakni secara kualitatif dan kuantitatif.
- d) Korelasi Data. Data yang telah ditransformasi ke dalam bentuk masing-masing dimensi kemudian dikorelasikan seperti misalnya data kuantitatif yang diperoleh dikorelasikan dengan data kuantitatif yang telah diolah atau dipublish oleh suatu pihak, dan data kualitatif yang diperoleh dikorelasikan dengan data kualitatif yang ada mengenai Polarisasi dan Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Jawa Barat.
- e) Konsolidasi Data. Pada tahapan ini, Data kualitatif dan kuantitatif yang telah dikorelasikan kemudian dikonsolidasikan atau dikombinasikan guna membentuk konsolidasi data atau variabel baru terkait dengan Polarisasi dan Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Jawa Barat.
- f) Perbandingan Data. Data kuantitatif dan data kualitatif yang telah berhasil dikumpulkan kemudian dibandingkan dengan satu sama lain. Peneliti menggunakan metode *Forum Group Discussion* (FGD) dalam rangka perbandingan dan konfirmasi data penelitian yang telah didapatkan sebelumnya.
- g) Integrasi Data. Pada Tahapan ini, data yang telah berhasil diolah hingga pada tahap perbandingan data kemudian diintegrasikan menjadi satu kesatuan data atau informasi yang berguna dalam memecahkan atau menjawab rumusan permasalahan penelitian.

Dalam penelitian ini, teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni di antaranya:

1. Kondensasi data yang terdiri dari tahapan-tahapan seperti pemilihan, *focusing*, penyederhanaan, dan transformasi data awal dan data-data temuan yang ditemukan selama proses pengumpulan data.
2. Penyederhanaan data menjadi segmen-segmen data yang kemudian disajikan dalam bentuk *chart* dan *table* yang diinterpretasikan ke dalam bentuk narasi serta *text*.
3. Penulisan kesimpulan adalah proses penyimpulan data yang dilakukan sejak data pertama terkumpul. Kesimpulan akhir baru muncul ketika tahap pengumpulan data terakhir. Setelah kesimpulan, rekomendasi dibuat berdasarkan hasil temuan peneliti untuk memperbaiki atau mengembangkan lebih lanjut terhadap subjek dan objek penelitian dimasa mendatang.

### 3.5 Validitas Data

Alat ukur pada suatu penelitian harus memenuhi kaidah-kaidah yang valid dan reliabel. Rubin dan Babbie (2011, p. 194) mengemukakan bahwa Triangulasi merupakan sebuah prinsip dimana pengumpulan data atau informasi yang sama dilakukan melalui pendekatan atau cara yang berbeda atau beragam. Hal tersebut guna menghindari *systematic measurement error* dalam suatu penelitian. Triangulasi dibutuhkan mengingat bahwa tiap-tiap indikator atau pengukuran pasti memiliki *potential source of error*. Dalam mengukur sebuah validitas maka triangulasi data harus dilakukan. Olsen (2004, p. 3) mengemukakan bahwa Triangulasi data, atau yang dikenal sebagai kombinasi pengumpulan tipe data, sering kali digunakan untuk membantu validasi klaim yang berkembang seiring dengan berjalannya suatu penelitian. Dalam penelitian ini, Triangulasi Data dilakukan melalui data unggul yang diperoleh dari sumber data primer kemudian diolah oleh Tim Peneliti menjadi temuan dalam penelitian ini. Temuan dalam penelitian ini diuji keobjektivitasannya dengan menggunakan metode Triangulasi Data dengan Pengujian data ini dilakukan dengan menggunakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan para *expertise* dan *stakeholder* yang dianggap memiliki kapabilitas untuk menjelaskan dan menjawab temuan-temuan peneliti, sehingga data yang dihasilkan tidak bersifat subjektif.

### 3.6 Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan Kajian Polarisasi dan Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Jawa Barat Menjelang Pemilu 2024, dilaksanakan selama empat minggu (dari minggu ke-1 bulan Oktober hingga minggu ke-4 bulan Oktober, terhitung sejak tanggal Surat Perintah Kerja).

**Tabel 3.1 Jangka Waktu Pelaksanaan Kajian Polarisasi dan Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Jawa Barat Menjelang Pemilu 2024**

No	Kegiatan	Oktober 2022			
		1	2	3	4
1	Tahap konstruksi				
2	Tahap lapangan				
3	Tahap coding dan cleaning data				
4	Tahap analisis data				
5	Tahap penyusunan laporan				

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **4.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Barat**

Berdasarkan Jawa Barat dalam Angka Tahun 2022 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, Provinsi Jawa Barat terletak pada 5° 50' - 7° 50' Lintang Selatan dan 104° 48' - 108° 48' Bujur Timur. Secara geografis, Provinsi Jawa Barat berbatasan dengan Laut Jawa dan Provinsi DKI Jakarta disebelah Utara, Provinsi Jawa Tengah disebelah Timur, Samudera Indonesia disebelah Selatan, dan Provinsi Banten disebelah Barat. Selain itu, Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi yang secara geografi dikelilingi oleh pegunungan didaerah tengah dan selatan dan memiliki dataran rendah didaerah sebelah utara. Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi yang memiliki fungsi hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi yang berkisar sebesar 22,10% dari total luas Jawa Barat.

Secara administratif pemerintahan, Provinsi Jawa Barat terdiri dari 27 kabupaten/kota meliputi 18 kabupaten dan 9 Kota. Kabupaten yang terdapat di Jawa Barat adalah diantaranya yakni Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat. Kota yang terdapat di Provinsi Jawa Barat diantaranya Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar.

Provinsi Jawa Barat memiliki daerah seluas 35.377,76 km<sup>2</sup>. Dengan Kabupaten Sukabumi menjadi daerah terluas di Jawa Barat yakni 4.145,70 km<sup>2</sup> dan Kota Cirebon menjadi daerah terkecil di Jawa Barat dengan total luas wilayah seluas 37,36 km<sup>2</sup>. Berikut merupakan rincian dari luas masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Barat:

Tabel 4. 1 Luas Daerah dan Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

<b>Kabupaten/Kota Regency/Municipality</b>	<b>Ibukota Kabupaten/Kota Capital of Regency/Municipality</b>	<b>Luas<sup>1</sup> Total Area<sup>1</sup> (km<sup>2</sup>/sq.km)</b>
(1)	(2)	(3)
<b>Kabupaten/Regency</b>		
Bogor	Cibinong	2 710,62
Sukabumi	Sukabumi	4 145,70
Cianjur	Cianjur	3 840,16
Bandung	Soreang	1 767,96
Garut	Garut	3 074,07
Tasikmalaya	Tasikmalaya	2 551,19
Ciamis	Ciamis	1 414,71
Kuningan	Kuningan	1 110,56
Cirebon	Sumber	984,52
Majalengka	Majalengka	1 204,24
Sumedang	Sumedang	1 518,33
Indramayu	Indramayu	2 040,11
Subang	Subang	1 893,95
Purwakarta	Purwakarta	825,74
Karawang	Karawang	1 652,20
Bekasi	Cikarang	1 224,88
Bandung Barat	Ngamprah	1 305,77
Pangandaran	Parigi	1 010,00
<b>Kota/ Municipality</b>		
Bogor	Bogor	118,50
Sukabumi	Sukabumi	48,25
Bandung	Bandung	167,67
Cirebon	Cirebon	37,36
Bekasi	Bekasi	206,61
Depok	Depok	200,29
Cimahi	Cimahi	39,27
Tasikmalaya	Tasikmalaya	171,61
Banjar	Banjar	113,49
<b>Jawa Barat</b>	<b>Bandung</b>	<b>35 377,76</b>

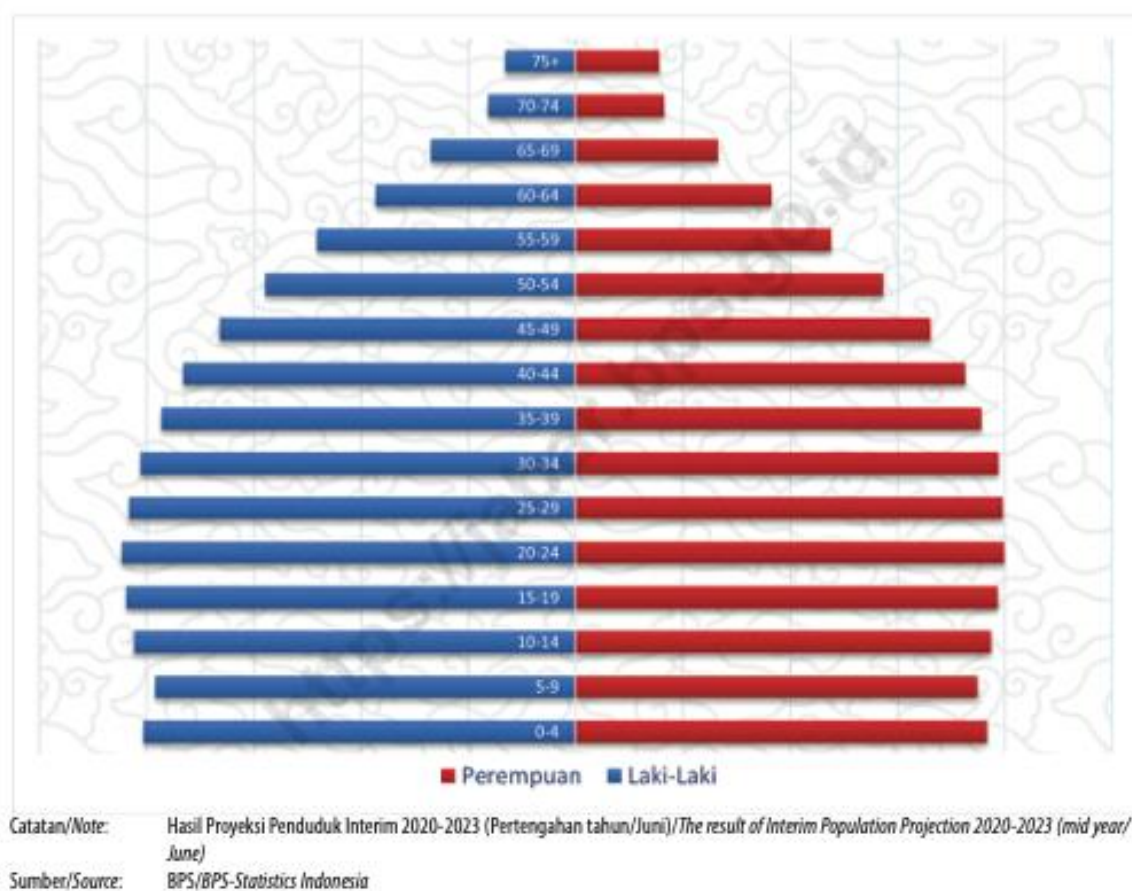
**Sumber:** (Badan Pusat Statistik, 2022)

Seperti yang dapat dilihat melalui tabel diatas, rata-rata luas wilayah kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat berkisar diangka lebih dari 1000 km<sup>2</sup> kecuali untuk Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Purwakarta. Kabupaten Sukabumi dan Cianjur menjadi Kabupaten terluas di Jawa Barat, sedangkan Kabupaten Cirebon dan Purwakarta menjadi Kabupaten dengan luas wilayah terkecil di Provinsi Jawa Barat. Disisi lain, Kota Bekasi dan Kota Depok menjadi Kota terluas di Provinsi Jawa barat dengan masing-masing luasnya yakni 206,61 km<sup>2</sup> dan 200,29 km<sup>2</sup>, sedangkan Kota Cirebon dan Cimahi menjadi Kota terkecil di Provinsi Jawa Barat dengan total luas wilayah masing-masing 37,36 km<sup>2</sup> dan 39,25 km<sup>2</sup>. (Badan Pusat Statistik, 2022)

### 4.1.1 Kependudukan

Piramida kependudukan Jawa Barat tergolong ke dalam bentuk Piramida Ekspansif, dimana jumlah penduduk usia muda lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tua. Hal tersebut menandakan bahwa tingkat kelahiran di Provinsi Jawa Barat tinggi, sedangkan tingkat kematian bayi ternilai cukup rendah. Berdasarkan Jawa Barat dalam Angka Pada Tahun 2022, Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat berkisar di angka 48,27 juta jiwa dengan proyeksi menyentuh angka 48,78 juta jiwa di Tahun 2020-2023 (kenaikan laju penduduk sebanyak 1,41 persen).

Gambar 4. 1 Piramuda Penduduk Provinsi Jawa Barat



Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2022)

Berdasarkan gambar diatas, kita dapat melihat bentuk dari Piramida penduduk di Provinsi Jawa Barat yang berbentuk ekspansif atau didominasi oleh kelompok umur produktif. Dalam data yang dirilis, Jumlah penduduk laki-laki berkisar diangka 24,76 Juta Jiwa (atau sebanyak 50,75 persen dari jumlah penduduk Jawa Barat) dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 24,03 juta jiwa (atau sebanyak 49,25 persen dari total jumlah penduduk Jawa Barat). Maka dari itu, rasio jenis kelamin penduduk Jawa Barat adalah sebesar 103 pada tahun 2021.

Jumlah penduduk di Jawa Barat paling padat berada di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor memiliki populasi sebanyak 5,49 juta jiwa penduduk atau sebanyak 11,25 persen dari



total jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat. Daerah terpadat kedua di Jawa Barat berada di Kabupaten Bandung dengan jumlah populasi sebanyak 3,67 juta jiwa penduduk atau sebanyak 7,52 persen dari total populasi penduduk di Jawa Barat. Disisi lain, Daerah dengan tingkat penduduk terendah berada di Kota Cirebon dengan jumlah penduduk sebanyak 336,86 ribu penduduk atau total sebanyak 0,69 persen dari total penduduk di Jawa Barat dan Kota Banjar sebagai daerah kedua yang memiliki tingkat penduduk terendah di Jawa Barat yakni sebanyak 203,42 ribu penduduk atau sebesar 0,42 persen dari total populasi di Jawa Barat. Berikut rinciannya:

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk di Provinsi Jawa Barat

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Penduduk (ribu) Population (thousand)	
	2020 <sup>1</sup>	2021 <sup>2</sup>
(1)	(2)	(3)
<b>Kabupaten/ Regency</b>		
Bogor	5 427,07	5 489,54
Sukabumi	2 725,45	2 761,48
Cianjur	2 477,56	2 506,68
Bandung	3 623,79	3 666,16
Garut	2 585,61	2 604,79
Tasikmalaya	1 865,20	1 883,73
Ciamis	1 229,07	1 237,73
Kuningan	1 167,69	1 180,39
Cirebon	2 270,62	2 290,97
Majalengka	1 305,48	1 318,97
Sumedang	1 152,51	1 159,35
Indramayu	1 834,43	1 851,38
Subang	1 595,32	1 608,59
Purwakarta	997,87	1 011,47
Karawang	2 439,09	2 468,58
Bekasi	3 113,02	3 157,96
Bandung Barat	1 788,34	1 814,23
Pangandaran	423,67	427,61
<b>Kota/ Municipality</b>		
Bogor	1 043,07	1 052,36
Sukabumi	346,33	350,80
Bandung	2 444,16	2 452,94
Cirebon	333,30	336,86
Bekasi	2 543,68	2 564,94
Depok	2 056,34	2 085,94
Cimahi	568,40	571,63
Tasikmalaya	716,16	723,92
Banjar	200,97	203,42
<b>Jawa Barat</b>	<b>48 274,16</b>	<b>48 782,40</b>

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2022)

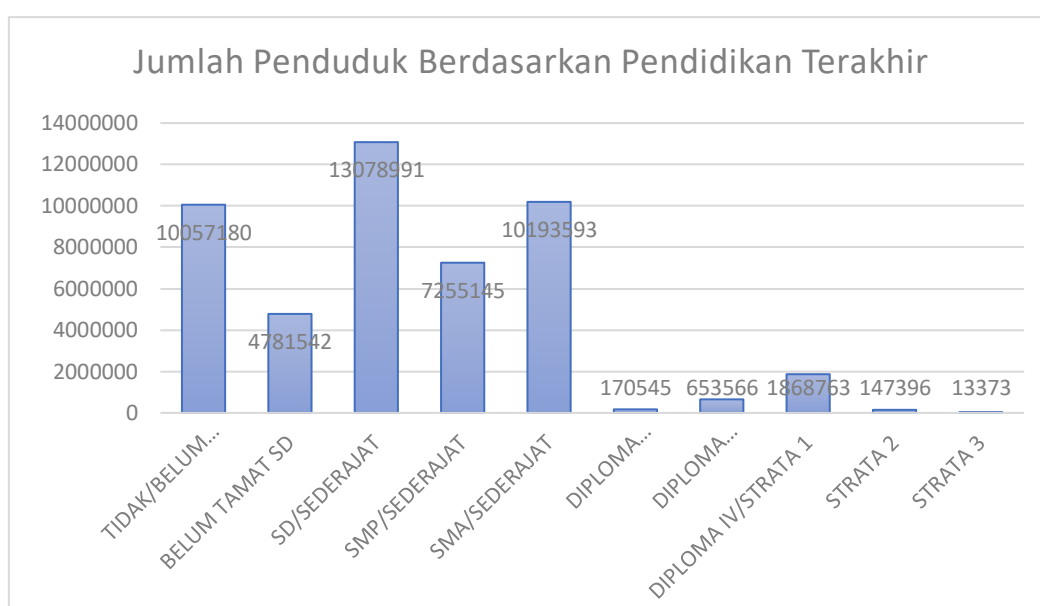
Tabel diatas menunjukkan jumlah populasi di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan informasi di atas, masing-masing kota/kabupaten memiliki kenaikan dalam jumlah penduduk dari Tahun 2020 hingga Tahun 2021, dimana meskipun peningkatannya tidak signifikan, tiap pertumbuhan yang ada di kabupaten/kota berkontribusi ke dalam peningkatan populasi Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan.

#### 4.1.2 Pendidikan

Sumber daya manusia selalu menjadi faktor terpenting di dalam pengembangan dan pembangunan bangsa. Salah satu cara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di suatu negara adalah dengan meningkatkan akses pendidikan. Pendidikan merupakan sebuah inkubasi untuk masyarakat dapat mengembangkan kreativitas dan inovasinya yang kerap akan

membantu perkembangan Indonesia dan pemerintah bertugas untuk menjamin warga negara mendapatkan akses yang adil dan merata untuk mendapatkan pendidikan. Pengukuran terhadap akses masyarakat terhadap pendidikan dilihat melalui Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Partisipasi Murni (APM) melihat seberapa banyak masyarakat berdasarkan usia sekolahnya dalam mendapatkan dan memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan pendidikannya. Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (2022), Angka Partisipasi Murni (APM) di Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, dimana APM pada pendidikan Sekolah Dasar/MI berada di angka 98,37 dari angka 100 (yakni terhitung sempurna), sedangkan untuk SMP, APM yang didapat yakni sebesar 82,88. Pada jenjang SMA, APM yang didapat yakni sebesar 58,58. Berikut merupakan rincian mengenai persentase pendidikan terakhir masyarakat Provinsi Jawa Barat yang didata oleh Open Data Provinsi Jawa Barat:

**Grafik 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir**



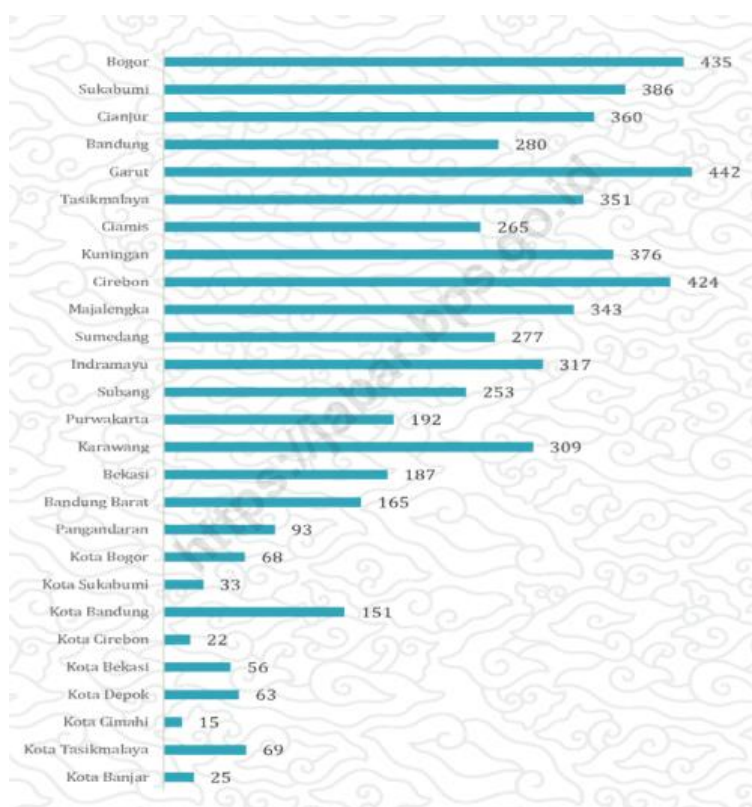
Sumber: Diolah oleh Penulis

Berdasarkan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan terakhir yang dimiliki oleh masyarakat di Provinsi Jawa Barat adalah Sekolah Dasar dengan total 13.078.991 Juta jiwa, sedangkan pendidikan terakhir SMA menjadi pendidikan terakhir kedua yang paling banyak dimiliki oleh masyarakat di Jawa Barat dengan total 10.193.593 Juta Jiwa per tahun 2021. Disisi lain, masyarakat Jawa Barat sangat sedikit sekali yang memiliki pendidikan terakhir Sarjana, Pascasarjana, dan Doktoral. Diketahui dari data diatas, masyarakat Jawa Barat yang memiliki pendidikan terakhir Sarjana yakni sebanyak 1.868.763 Jiwa, Pasca sarjana sebanyak 147.396 ribu Jiwa, dan Doktoral sebanyak 13.373 ribu Jiwa. (Open Data Prov. Jabar, 2021)

### 4.1.3 Pemerintahan

Dalam perspektif pemerintahan, terdapat 627 kecamatan yang dipimpin oleh seorang camat dan 5.957 desa/kelurahan dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Secara data yang dijelaskan oleh Badan Pusat Statistik Pada Tahun 2022, Kabupaten Bogor merupakan kabupaten dengan jumlah desa terbanyak di Jawa Barat sebanyak 435 desa. Selain itu, Kabupaten Garut menjadi daerah kedua dengan desa terbanyak di Jawa Barat yakni sebanyak 442 desa. Disisi lain, Kota Cimahi dan Kota Cirebon menjadi kota dengan jumlah desa paling sedikit di Jawa Barat yakni sebanyak masing-masing 15 dan 22 Desa. Berikut rincian detail jumlah desa masing-masing daerah di Jawa Barat:

Gambar 4. 2 Jumlah Desa/Kelurahan Masing-Masing Daerah di Jawa Barat



Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2022)

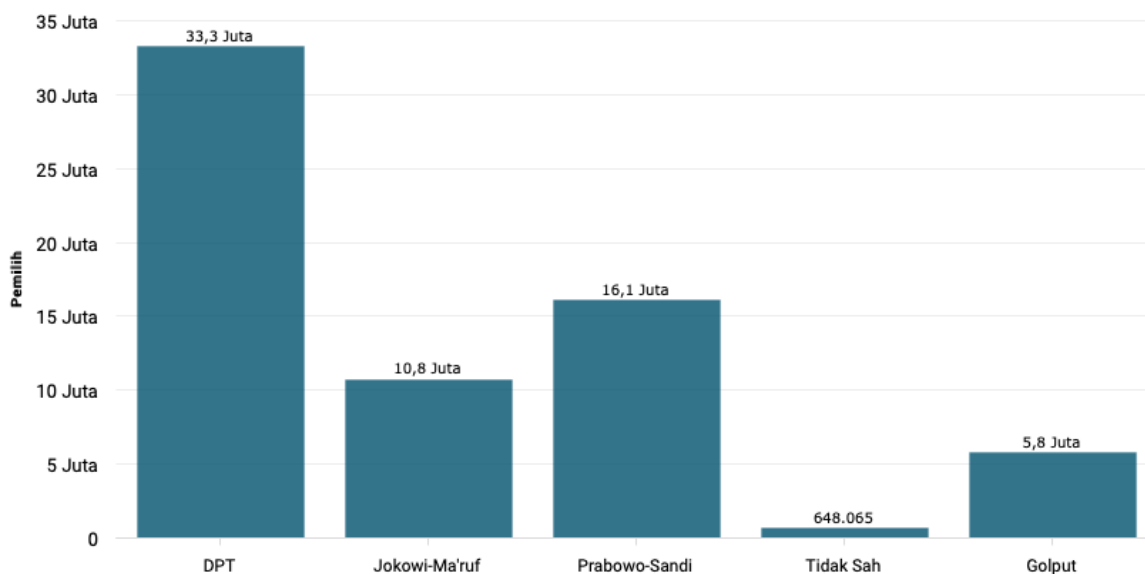
Dalam segi kedudukan kursi parlemen, terdapat sebanyak 120 orang anggota dewan terpilih dalam dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I di Provinsi Jawa Barat. Terdapat 94 anggota parlemen laki-laki dan 26 anggota parlemen wanita. Selain itu, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Provinsi Jawa Barat terdapat sebanyak 1.280 anggota dengan rincian yakni terdiri dari 1.041 anggota laki-laki dan 239 anggota Wanita.

### 4.1.4 Politik dan Pemilihan Presiden 2019

Kondisi politik di Jawa Barat dilihat salah satunya melalui dinamika masyarakat pada masa pemilihan umum. Partisipasi masyarakat pada masa pemilu, terjalannya demokrasi dan pemilihan yang jujur, adil, dan adil merupakan prinsip-prinsip fundamental dalam perpolitikan di Jawa Barat. selain itu, afiliasi dan kecenderungan masyarakat terhadap suatu kelompok

politik atau partai politik dapat membantu untuk memetakan peta dan dinamika politik di Jawa Barat. Kata Data mengemukakan hasil olahan data terkait dengan partisipasi pemilu masyarakat Jawa Barat pada Tahun 2019 yang diantaranya yakni (Viva Budy Kusnandar, 2019):

Grafik 4. 2 Partisipasi Pemilu Jawa Barat Tahun 2019



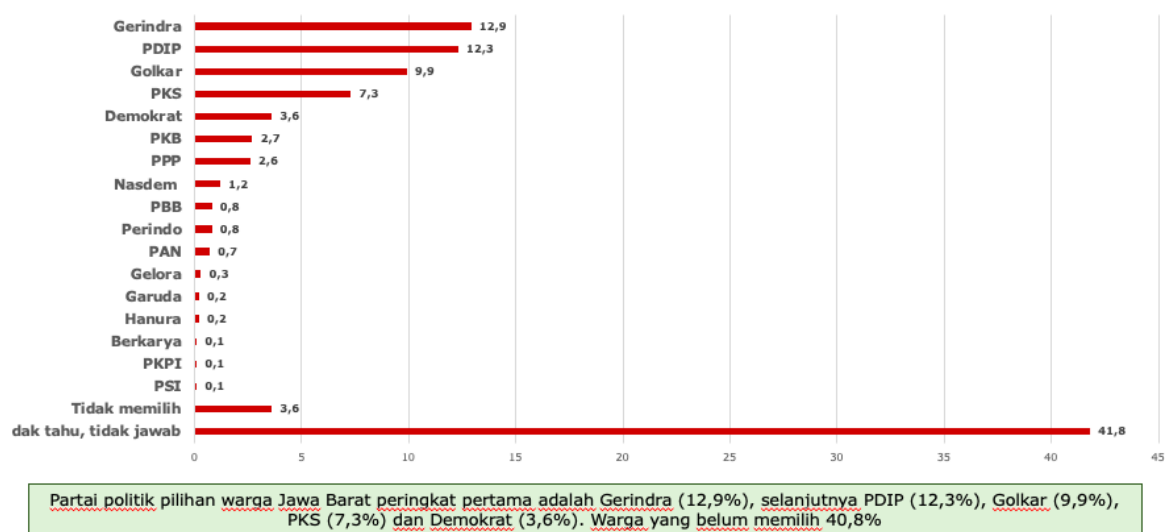
Sumber: (Viva Budy Kusnandar, 2019)

Data diatas menunjukkan bahwa masyarakat Jawa Barat yang menggunakan hak pilih mencapai 27,48 Juta jiwa penduduk Jawa Barat. Jumlah tersebut tercermin dari akumulasi suara sah dan tidak sah yakni masing-masing sebanyak 26,82 Juta suara dan 648 Ribu suara. Melalui hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa, dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tertera sebanyak 33,27 Juta jiwa, penggunaan hak pilih masyarakat Jawa Barat mencapai senilai 82,58% dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT). Angka yang baik menandakan bahwa kondisi perpolitikan di Jawa Barat masih di dalam kondisi yang baik. Selain itu, pada kontestasi pemilu tahun 2019, Pasangan Prabowo dan Sandi Unggul sebanyak 19,86% dibandingkan dengan Pasangan Jokowi- Ma'ruf Amin. Prabowo Subianto dan Sandi menang sebanyak 59,93% dan Pasangan Jokowi- Ma'ruf mendapat suara sebanyak 40,07% di Jawa Barat. hal tersebut sejalan dengan data yang data yang dirilis oleh *Indonesian Politics Research and Consulting* (IPRC) dalam surveinya mengenai survei elektoral di Jawa Barat yakni diantaranya:

Grafik 4.3

### Partai Politik yang dipilih oleh Masyarakat Jika Pemilu diadakan pada saat ini

Jika pemilu diadakan hari ini, partai politik atau calon dari partai politik mana yang Ibu/Bapak/Saudara akan pilih?

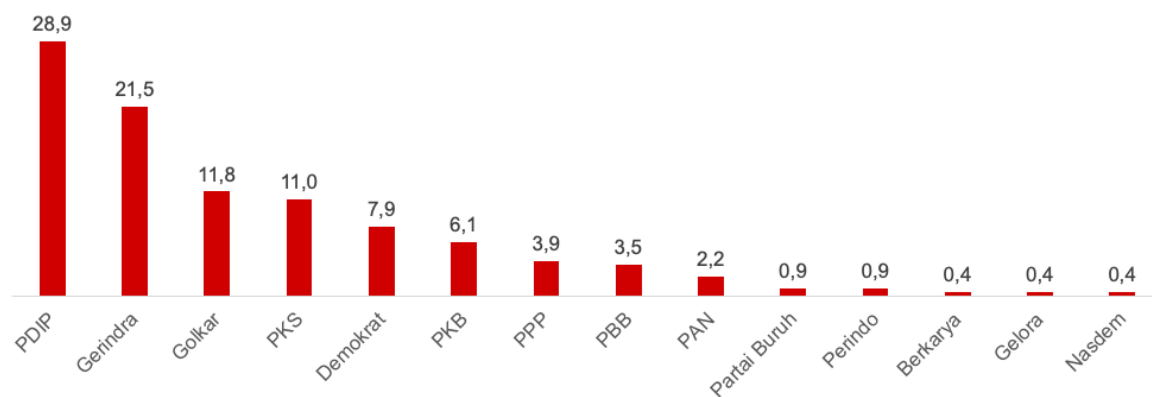


Sumber: Data Olahan Hasil Survei IPRC

Data diatas menunjukkan bahwa Partai Gerindra mendapatkan elektabilitas tertinggi dibandingkan dengan Partai lainnya. Partai Gerindra meraih elektabilitas sebanyak 12,9%, sedangkan Partai PDIP menempati peringkat kedua partai dengan elektabilitas tertinggi sebanyak 12,3%. Kemenangan Prabowo-Sandi di Jawa Barat dipengaruhi oleh elektabilitas partai gerindra yang tinggi di Jawa Barat, namun persaingan elektabilitas antara Gerindra dan PDIP merupakan persaingan sengit yang hanya berkisar kurang dari 1%, maka dari itu dinamika yang terjadi di Jawa Barat cukup tinggi diantara kedua partai ini.

Disisi lain, Data lain juga dikemukakan oleh penemuan survei Indonesian *Politics Research and Consulting* (IPRC) terkait dengan afiliasi masyarakat Jawa Barat dengan Partai Politik, berikut merupakan hasil yang ditemukan oleh survei dari IPRC tersebut:

Grafik 4.4 Kedekatan Masyarakat Jawa Barat dengan Partai Politik



Sumber: Data Olahan Hasil Survei IPRC

Dalam data diatas menunjukkan bahwa sebanyak 28,9% Penduduk Jawa Barat memiliki perasaan terhadap kedekatan dengan PDIP. Di posisi kedua, masyarakat Jawa Barat memiliki

kedekatan dengan Partai Gerindra dengan sebanyak 21,5% masyarakat Jawa Barat memilih partai tersebut. meskipun berbeda dengan hasil dari elektabilitas partai yang dikemukakan pada Survei IPRC pada Tahun 2021, kedua partai yakni PDIP dan Gerindra masih menjadi Partai pilihan yang dekat di dalam lingkungan masyarakat Jawa Barat.

#### 4.1.5 Agama & Organisasi Keagamaan di Jawa Barat

Sebagai Negara multikultural, Indonesia mengakui lima agama resmi yang dianut oleh masyarakat di Indonesia yakni diantaranya Islam, Protestan, Katolik, Hinda, dan Budha. Sama halnya dengan Provinsi Jawa Barat, agama yang dianut oleh masyarakat di Jawa Barat pun beragam. Potensi polarisasi dan konflik keagamaan rentan terjadi apabila tidak dilakukan deteksi dini terhadap kelompok militant atau paham-paham ekstrimis yang mengakar dan menjalar melalui elemen terkecil di dalam masyarakat seperti pendidikan, pergaulan, kelompok agama dan sebagainya. Badan Pusat Statistik dalam rilis tahunannya yakni Jawa Barat dalam Angka Tahun 2022 merilis data sebaran agama yang dianut oleh masyarakat di Provinsi Jawa Barat yang diantaranya yakni sebagai berikut:

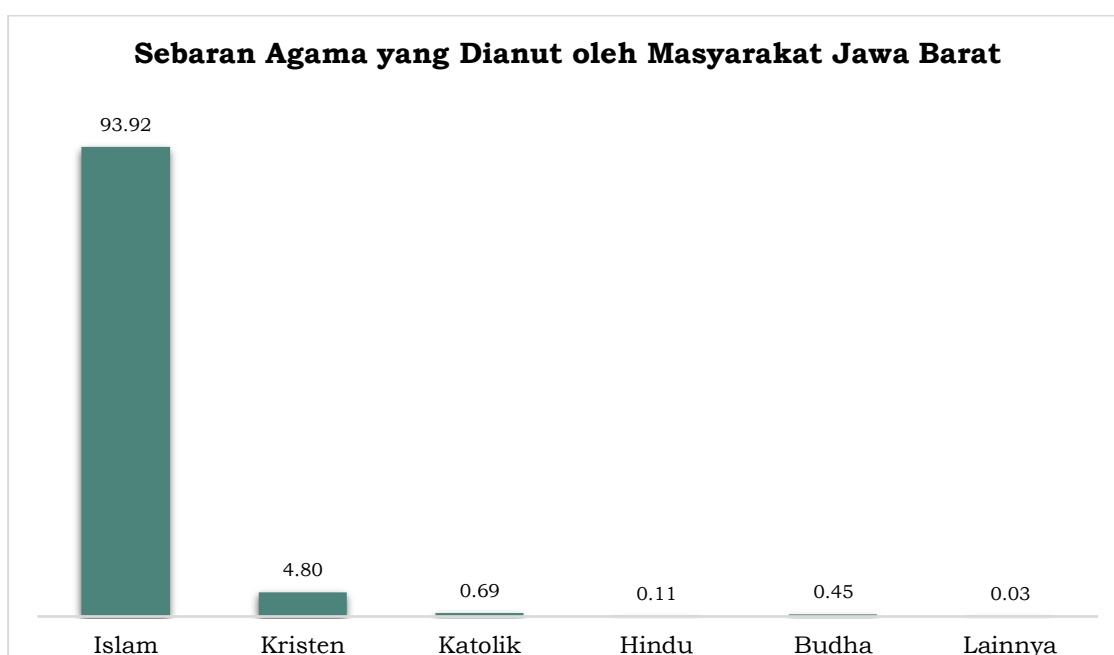
*Tabel 4. 3 Sebaran agama yang dianut di Provinsi Jawa Barat*

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Islam	Protestan Protestant	Katolik Catholic	Hindu	Budha Buddha	Lainnya Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Kabupaten/Regency</b>						
Bogor	4 867 370	152 148	14 238	1 727	19 667	...
Sukabumi	2 388 237	400 608	6 822	0	8 192	...
Cianjur	2 214 707	34 602	3 483	81	10 761	...
Bandung	2 855 795	180 865	12 132	480	9 891	...
Garut	2 452 203	26 749	1 529	0	821	...
Tasikmalaya	1 171 980	20 059	1 475	0	247	...
Ciamis	1 563 154	26 227	987	0	820	...
Kuningan	1 056 301	17 668	5 498	0	5 407	...
Cirebon	2 108 540	63 161	903	361	13 363	...
Majalengka	654 708	66 415	126	0	4 820	...
Sumedang	1 301 047	22 430	446	0	776	...
Indramayu	1 697 012	18 490	1 281	0	660	...
Subang	1 494 461	20 363	1 888	27	964	...
Purwakarta	869 571	22 026	3 451	82	3 009	...
Karawang	2 170 347	53 102	4 137	258	24 251	...
Bekasi	2 378 115	137 254	11 925	1 234	20 617	...
Bandung Barat	1 540 490	12 237	2 294	175	783	...
Pangandaran		279	154	0	558	...
<b>Kota/ Municipality</b>						
Bogor	969 343	68 795	55 911	2 653	13 138	...
Sukabumi	304 656	85 840	3 852	60	9 079	...
Bandung	2 829 089	606 092	55 305	5 109	16 475	...
Cirebon	302 317	88 608	9 155	361	11 488	...
Bekasi	2 381 568	199 600	72 375	27 943	20 650	...
Depok	1 773 341	101 497	25 081	2 770	1 979	...
Cimahi	552 000	20 858	12 904	672	1 922	...
Tasikmalaya	585 011	25 840	4 508	0	1 151	...
Banjar	107 755	16 300	436	16	626	...
<b>Jawa Barat</b>	<b>42 589 118</b>	<b>2 488 113</b>	<b>312 296</b>	<b>44 009</b>	<b>202 115</b>	<b>...</b>

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2022)

Seperti yang tertera di dalam tabel diatas, Agama Islam masih menjadi agama yang tercatat paling banyak dianut di Provinsi Jawa Barat. Sebanyak total 42.589.118 jiwa atau sebanyak 93 persen dari total populasi masyarakat di Provinsi Jawa Barat menganut agama Islam. Agama kedua yang paling banyak dianut oleh masyarakat Jawa Barat yakni Protestan yakni sebanyak 2.488.113 jiwa di Jawa Barat. disisi lain, agama Hindu menjadi agama yang paling sedikit dianut oleh masyarakat di Provinsi Jawa Barat dengan total sebanyak 44.009 jiwa yang menganut agama tersebut. data yang ditunjukkan oleh Badan Pusat Statistik diatas merupakan data yang sejalan dengan penemuan data yang dilakukan Open Data Provinsi Jawa Barat yakni sebagai berikut:

Grafik 4. 5 Agama yang dianut oleh Masyarakat Jawa Barat versi Open Data



Sumber: Diolah dari [opendata.jabarprov.go.id](http://opendata.jabarprov.go.id)

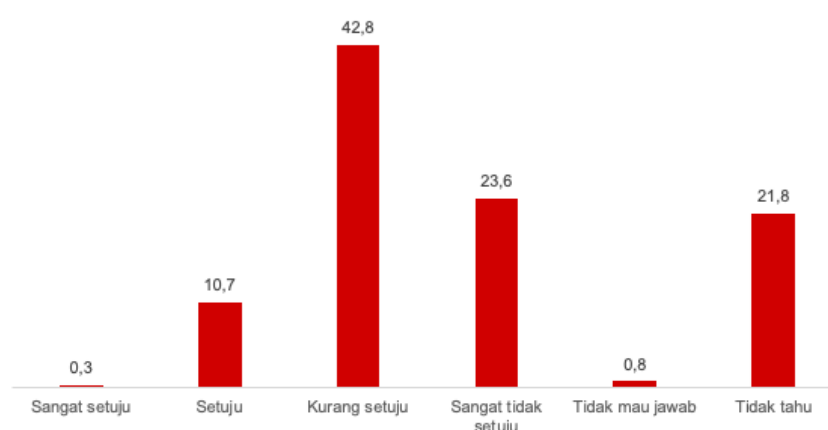
Berdasarkan pada data yang berhasil diperoleh dari [opendata.jabarprov.go.id](http://opendata.jabarprov.go.id), data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas atau 93,92% penduduk Jawa Barat menganut agama Islam. Sisanya tersebar pada agama lain, yakni, Kristen 4,80%, Katolik 0,69%, Hindu 0,11%, dan Buddha 0,45%. Sesuai dengan kedua data diatas, Islam masih menjadi agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Jawa Barat, sedangkan agama Hindu menjadi agama dengan penganut paling sedikit di Jawa Barat.

## BAB V PEMBAHASAN

### 5.1 Politik Identitas pada pemilu 2019 di Provinsi Jawa Barat

Politik Identitas merupakan fenomena sosial yang kerap terjadi di dalam kontestasi pemilihan umum di Indonesia. Politik Identitas sangat mungkin terjadi di Indonesia, yang notabenehnya, sebagai negara multikultural, dimana nilai-nilai pluralisme sangat dibutuhkan disini dalam mencegah terjadinya Politik Identitas karena semakin beragam suatu negara maka akan semakin dinamis masyarakatnya.

*Grafik 5. 1 Pendapat Masyarakat Jawa Barat mengenai Demokrasi dan Islam*

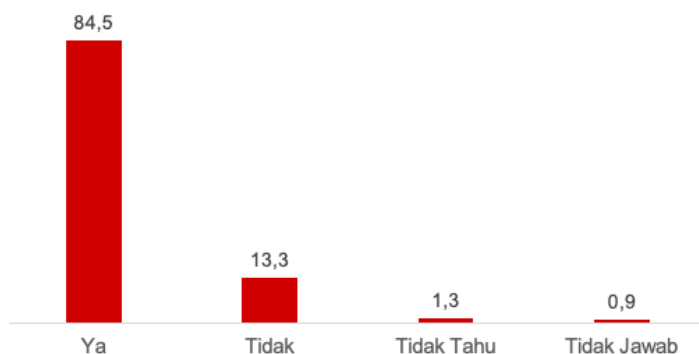


Sumber: Survei IPRC Tahun 2021

Berdasarkan data temuan diatas, Masyarakat Jawa Barat sejauh ini masih berpegang kepada demokrasi sebagai sebuah sistem yang dapat hidup beringan dengan nilai dan norma yang dianut oleh ajaran Islam. Hal tersebut dapat terlihat melalui banyaknya pilihan masyarakat Jawa Barat yang memilih “kurang setuju” dalam pertanyaan diatas. Terdapat sebanyak 42,8% masyarakat Jawa Barat menyatakan bahwa mereka tidak setuju untuk mengganti demokrasi karena dinilai bertentangan dengan ajaran Islam. Namun, ancaman polarisasi dan konflik patut menjadi perhatian karena terdapat 11% masyarakat Jawa Barat, yang memilih “Sangat Setuju” dan “Setuju” untuk mengganti sistem demokrasi dan berpendapat bahwa demokrasi bertentangan dengan nilai dan ajaran agama Islam. Meskipun jumlahnya relatif sedikit, potensi dan ancaman penyebaran gagasan dan paham tersebut dapat membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia sebagai negara demokrasi. Selanjutnya terdapat juga penemuan mengenai persepsi masyarakat dalam memilih calon pemimpin bangsa, salah satunya Presiden. Berikut hasil temuannya:



Grafik 5. 2 Pilihan Presiden berdasarkan Agama

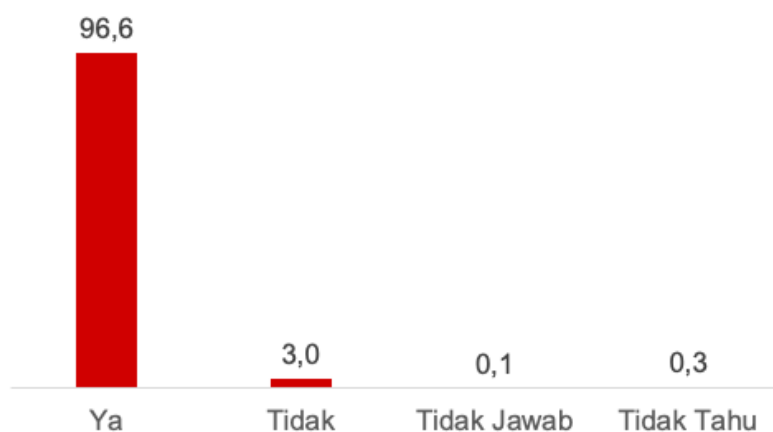


Sumber: Survei IPRC Tahun 2021

Data diatas menunjukkan bahwa kesamaan dan kecenderungan terhadap suatu agama masih menjadi dasar dalam memilih Presiden. Berdasarkan data diatas, terdapat sebanyak 84,5% masyarakat Jawa Barat memilih agama menjadi dasar penting dalam memilih Presiden, sedangkan 13,3% masyarakat Jawa Barat memilih bahwa agama bukan dasar bagi memilih Presiden. Hal tersebut menjadi penting karena potensi konflik dan munculnya politik identitas di Jawa Barat sangat tinggi, mengingat bahwa agama menjadi salah satu konsiderasi penting dalam memilih Presiden. Istilah “Agama” dapat disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk meraih kemenangan dan menjatuhkan lawannya yang berbeda dan bertentangan dengan nilai dan ajaran agama, terutama agama Islam sebagai agama mayoritas di Jawa Barat maupun di Indonesia.

Argumentasi diatas didukung oleh hasil temuan lainnya yang dikemukakan oleh IPRC pada Surveinya. Temuan tersebut diilustrasikan ke dalam grafik sebagai berikut:

*Grafik 5. 3 Pendapat Masyarakat Presiden Harus Beragama Islam*



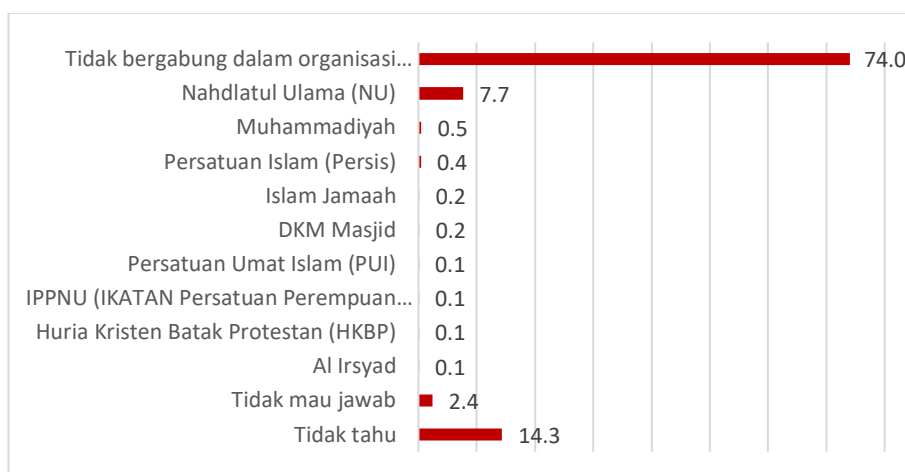
Sumber: Survei IPRC Tahun 2021

Berdasarkan data yang dikemukakan diatas, Terdapat sebanyak 96,6% masyarakat Jawa Barat berpendapat bahwa Presiden Indonesia harus memeluk agama Islam, sedangkan sangat sedikit lainnya, yakni sebanyak 3% dari masyarakat Jawa Barat, berpendapat bahwa Presiden tidak harus memeluk agama Islam. Isu SARA dan Politik Identitas sangat rentan terjadi di Jawa Barat, sehingga hal tersebut harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat untuk mencegah dan mendeteksi adanya isu-isu SARA yang mengancam persatuan dan memperuncing polarisasi antara kelompok-kelompok yang berbeda.

Berdasarkan data-data diatas, dapat disimpulkan bahwa potensi dan ancaman terhadap polarisasi dan politik identitas yang disebabkan oleh kurang tolerannya masyarakat Jawa Barat masih menjadi permasalahan yang harus dicermati oleh penyelenggara pemilu maupun pihak-pihak terkait. Adanya gagasan dan pendapat bahwa Presiden Republik Indonesia harus beragama Islam menjadi berbahaya apabila digunakan secara simbolik dalam masa pemilihan presiden pada tahun 2024. Maka dari itu, pencegahan sejak dini terhadap penyebaran gagasan dan paham seperti itu menjadi fundamental untuk dilakukan dengan tujuan mengurangi dampak sosial politik yang kemungkinan akan terjadi pada tahun pemilihan.

Disisi lain, Agama dan Kelompok keagamaan merupakan sesuatu yang saling melengkapi. Penganut agama mengekspresikan praktik dan nilai-nilai keagamaan yang dianutnya melalui kelompok atau organisasi keagamaan sebagai upaya agar dapat lebih mendekatkan diri kepada ajaran-ajaran keagamaan serta melestarikan praktik dan budaya keagamaan di dalam masing-masing kepercayaan yang dimiliki. Secara umum, terdapat beberapa organisasi keagamaan yang terkenal di wilayah Jawa Barat seperti Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam, Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) dan masih banyak lagi. Berdasarkan hasil survei yang dikemukakan oleh *Indonesian Politics Research and Consulting (IPRC)*, terdapat hasil dari banyaknya masyarakat yang mengikuti organisasi keagamaan yang diantaranya yakni sebagai berikut:

Grafik 5. 4 Partisipasi Masyarakat Jawa Barat dalam Organisasi Keagamaan



Sumber: Hasil Survei IPRC 2021

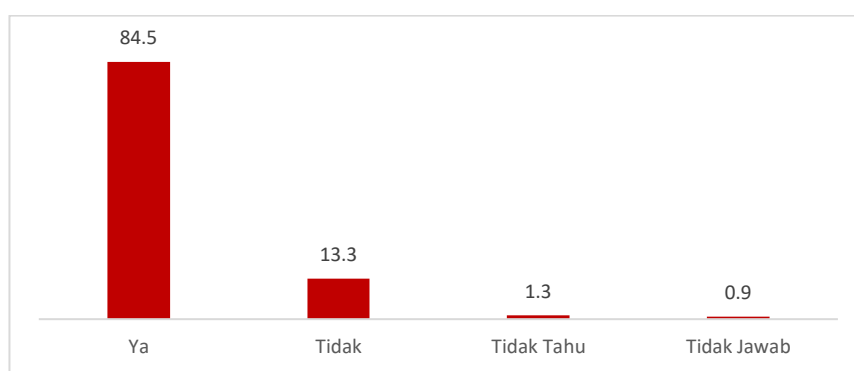
Berdasarkan pada temuan survei yang dilakukan Indonesian Politics Research and Consulting (IPRC) pada tahun 2021, partisipasi masyarakat terhadap organisasi keagamaan terbilang minim. Grafik diatas menunjukkan sebanyak 74,0% masyarakat Jawa Barat tidak terafiliasi dengan organisasi keagamaan mana pun. Minimnya partisipasi dalam organisasi keagamaan dapat menjadi pengertian yang multitafsir diantara organisasi keagamaan yang belum mampu merangkul sebagian besar dari masyarakat untuk bergabung atau pilihan apatis masyarakat Jawa Barat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan melalui organisasi keagamaan karena, seperti apa yang telah dikemukakan oleh Goldbreg dalam (Siregar, 2021) bahwa pembentukan sebuah organisasi dilakukan atas dasar keinginan untuk pemenuhan kebutuhan bersama, sehingga pada akhirnya menimbulkan motivasi untuk membuat sebuah organisasi. Motivasi terbentuk semakin kuat berdasarkan ikatan emosional dari masing-masing individu yang ingin berinteraksi dan berkomunikasi dengan satu sama lain. Maka dari itu, minimnya partisipasi masyarakat di Jawa Barat dapat diartikan belum terciptanya ikatan emosional yang cukup untuk membentuk sebuah motivasi untuk mengikuti organisasi keagamaan dalam masing-masing agama. Namun, masih terdapat sekitar 26% dari masyarakat Jawa Barat yang mengikuti organisasi keagamaan seperti yakni Nahdhatul Ulama (NU) sebagai organisasi keagamaan yang paling banyak diikuti oleh masyarakat di Jawa Barat, sedangkan organisasi lain seperti Muhammadiyah, Persatuan Islam, dan sebagainya meraup Sebagian kecil dari masyarakat untuk menjadi anggota dan terafiliasi oleh organisasi keagamaan tersebut.

Polarisasi dan Politik Identitas menjadi bahaya laten yang didapati di dalam kondisi masyarakat yang memiliki struktur beragam. Ancaman tersebut dapat semakin memperuncing perbedaan diantara masing-masing kelompok, sehingga dapat menghasilkan konflik yang berdampak kepada kesatuan dan persatuan Negara Republik Indonesia. Dalam kondisi sosial dan politik di Indonesia, Polarisasi dan Politik Identitas tersebut menjadi senjata yang

digunakan, terutama, dalam hal memperebutkan kekuasaan dalam mekanisme pemilihan umum. Banyak oknum-oknum yang menggunakan politik identitas untuk mendapatkan suara kemenangan terutama bagi kelompok yang mayoritas, seperti diketahui di dalam penjelasan, yakni agama Islam yang menjadi agama mayoritas di Jawa Barat.

Agama dan penganut agama merupakan satu kesatuan yang saling terikat antara satu sama lain, sehingga dasar-dasar ajaran agama banyak dijadikan celah untuk memecah dengan kelompok lainnya yang berbeda dari kelompok tersebut seakan apa yang sedang diperjuangkan merupakan kepentingan dan kepentingan untuk suatu golongan, melainkan kepentingan dari sekelompok politisi atau golongan dalam memenangkan pemilihan umum. *Indonesian Politics Research and Consulting* (IPRC), dalam surveinya, menemukan seberapa penting agama diperhitungkan dalam memilih pemimpin negara di Indonesia, seperti diantaranya yakni:

*Grafik 5. 5 Agama menjadi dasar dalam memilih Presiden*



Sumber: Hasil Survei IPRC 2021

Grafik diatas menunjukkan mayoritas masyarakat atau 84,5%, menjadikan agama menjadi dasar penting dalam memilih Presiden, hanya terdapat 13,3% masyarakat yang menyatakan tidak menjadikan agama sebagai dasar dalam memilih presiden. Hal diatas menandakan bahwa agama masih menjadi dasar pertimbangan masyarakat Jawa Barat dalam memilih Presiden. Hal tersebut harus menjadi perhatian serius, terutama untuk pihak-pihak penyelenggara pemilu, dalam meminimalisir terjadinya konflik dan praktik-praktik yang melanggar aturan pemilihan umum, sehingga demokrasi tetap terjaga dari adanya praktik-praktik yang menyebabkan kemunduran demokrasi di Indonesia.

Politik Identitas diketahui mewarnai Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta pada Tahun 2017, dimana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kalah dalam melawan Anies Baswedan karena isu SARA dan penistaan agama yang diyakini terjadi dan melibatkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai tersangka utama. Burhanuddin Muhtadi (2017) mengemukakan bahwa fenomena politik identitas yang dialami oleh Ahok merupakan proses yang sudah terjadi bahkan sebelum Ahok kembali mencalonkan diri menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta pada Tahun 2017. Hal tersebut terlihat dari kepuasan masyarakat DKI Jakarta terhadap Ahok yang

begitu tinggi, namun hal tersebut dibarengi dengan kesulitan hati dari masyarakat DKI Jakarta untuk menerima Ahok yang dianggap bukan representasi penuh dari masyarakat DKI Jakarta. Ahok dianggap sebagai representasi yang liyan atau, dengan kata lain, “*The Representative of Others*”. Ahok memiliki dua lapis minoritas, yakni: Kristen dan Tionghoa. Naiknya kembali Ahok dianggap sebagai ancaman bagi mayoritas bahwa sinyal dari dominasi minoritas, dalam segi perekonomian dan, kini masuk ke politik, dapat mematikan lawan politik dan perekonomian di DKI Jakarta. Kasus Al-Maidah menjadi sebuah pemicu atau *trigger* bagi *undecided voters* untuk memberikan suara kepada lawan Ahok, yakni Anies Baswedan karena meskipun agama memiliki efek elektoral yang tidak begitu signifikan pada masa Pilgub DKI Jakarta, namun alasan-alasan primordial masih menjadi dasar terhadap bagaimana publik memilih calon pemimpin bangsa.

Tidak hanya di DKI Jakarta, Politik Identitas juga terjadi di berbagai daerah, tidak terkecuali Provinsi Jawa Barat. Pada tingkat pemilihan umum Presiden, Politik Identitas sangat kental terjadi di Jawa Barat. seperti diketahui, Prabowo Subianto- Sandiaga mengungguli Jokowi Ma’ruf dalam segi perolehan suara karena disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yakni Identitas kesundaan. Pasangan Jokowi-Ma’ruf diyakini optimis unggul dalam memperoleh suara di Jawa Barat, yang dinobatkan sebagai provinsi dengan 20% dari total suara di Indonesia, karena program-program infrastrukturnya yang diyakini dapat menjadi daya tarik bagi pasangan tersebut. seperti diketahui, salah satu programnya yakni Citarum Harum, dimana permasalahan lingkungan di Sungai Citarum yang meresahkan dari tahun ke tahun, menyebabkan banjir serta ketidaknyamanan masyarakat sekitar untuk hidup di lingkungan Sungai Citarum. Politik identitas juga tercermin secara simbolik dengan slogan Paslon 01 Joko Widodo- Ma’ruf Amin di dalam spanduk yang berisi bahwa Ma’ruf Amin yang disebut sebagai Kyai, keturunan ulama, dan *Sunda Pituin* (atau keturunan langsung orang Sunda). Akan tetapi, perolehan suara berkata lain, Pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno unggul di hampir seluruh wilayah Jawa Barat, yakni unggul di 21 kabupaten/kota, dengan perolehan suara sebesar 53,93% dari total suara di Jawa Barat, sedangkan Pasangan Jokowi dan Ma’ruf Amin hanya unggul di 6 kabupaten/kota dengan total perolehan suara sebanyak 40,07% dari total suara di Jawa Barat. (Tempo, 2019)

Kekalahan Pasangan Jokowi dan Ma’ruf Amin memberikan petunjuk yang jelas bahwa agama memiliki insentif elektoral yang kurang signifikan di Jawa Barat. Ma’ruf Amin yang merupakan representatif dari kalangan ulama yang besar di Nahdhatul Ulama kurang meyakinkan warga Jawa Barat karena beberapa faktor yang diantaranya (Quin Pasaribu, 2019):

1. Masyarakat Jawa Barat yang kurang identik dengan Nahdhatul Ulama. Masyarakat Jawa Barat cenderung lebih dekat dengan Persatuan Islam (Persis). Selain itu, Mayoritas muslim di Jawa Barat merupakan pemilih rasional yang dekat dengan

kelompok Islam kritis seperti Persis dan PA 212, sehingga dukungan Imam Besar Rizieq Shihab pada masa tersebut terhadap Prabowo berdampak signifikan dalam perolehan suara Prabowo di Jawa Barat.

2. Ma'ruf Amin lebih merepresentasikan kebantenannya dibandingkan dengan Sunda Pituin (keturunan langsung sunda, atau sumedang).

## **5.2 Polarisasi Agama pada pemilu 2019 di Provinsi Jawa Barat**

Polarisasi Agama yang terjadi pada pemilihan umum di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 merupakan polarisasi agama yang terjadi di tingkat mikro dan makro. Seperti apa yang dikemukakan oleh Perry (2022), Polarisasi keagamaan di Jawa Barat di level mikro terjadi ketika polarisasi terjadi di dalam elemen terkecil masyarakat seperti sekolah dan kelompok keagamaan. Selain itu, kyai ataupun ulama setempat sangat berpengaruh dalam menentukan pilihan hidup dan cara bersikap dari masyarakat sekitar. Peran ulama kian mempengaruhi pilihan dan cara pandang politik masyarakat sekitar.

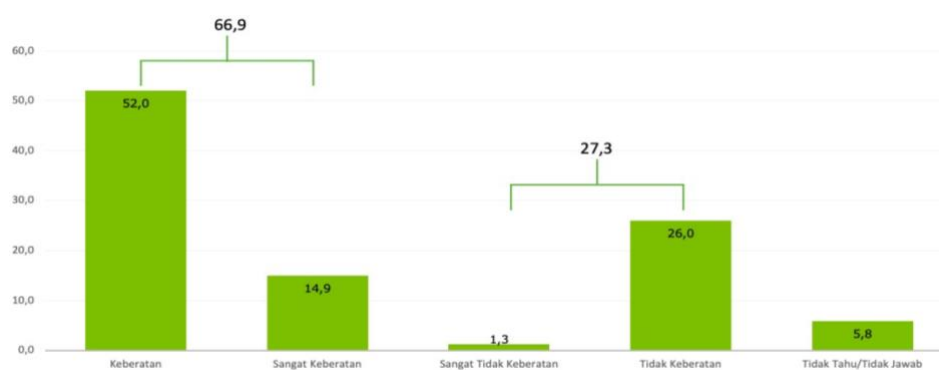
Hubungan Patron-Klien dapat menjadi salah satu akibat dari kuatnya pengaruh dari pemuka agama di pesantren atau sekolah keagamaan di Jawa Barat dalam menentukan atau menggiring pilihan politik murid atau santrinya karena hubungan patron-klien diantara kyai dan santrinya merupakan hubungan yang memiliki kedekatan yang sangat dalam dan personal. Seperti apa yang dikemukakan oleh Setiawan (2016), Pola relasi kiai dan santri merupakan hubungan yang bersifat dialektik. Hal tersebut diartikan bahwa hubungan diantara keduanya merupakan hubungan yang saling mempengaruhi dan membuahkan hasil dari hubungan tersebut. Relasi antara kiai dan santri merupakan hubungan yang sakral dan kuat karena hubungan keduanya dipenuhi oleh kepatuhan, ketulusan, dan penghormatan terhadap kiai sebagai guru dan pengarah kehidupan yang begitu tinggi. Berangkat dari gagasan diatas, maka hubungan patron-klien yang terdapat di pesantren atau sekolah keagamaan di beberapa daerah di Provinsi Jawa Barat dapat sangat mempengaruhi keputusan dan kepercayaan terhadap nilai-nilai politik yang patut untuk dijalani.

Kota Tasikmalaya merupakan salah satu contoh dimana polarisasi agama level mikro terjadi. Peran pemuka agama seperti Kiai dan Ulama sangat penting dalam membentuk arah perpolitikan di Kota Tasikmalaya. Peran pemuka agama di Kota Tasikmalaya sangat signifikan dikarenakan Kota Tasikmalaya yang dinilai sebagai Kota Santri dan berhasil dalam melanggengkan dominasi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Nasir (2015) mengemukakan bahwa Peran Pemuka Agama di Kota Tasikmalaya tidak hanya pada tingkat pemilihan umum legislatif, tetapi juga dalam Pemilihan Kepala Daerah dengan memberikan dukungan terhadap suatu pasangan atau kandidat dengan menggunakan dalih agama. Hal tersebut juga sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Greetz (1981) dalam (Nasir, 2015) bahwa hubungan polarisasi agama dengan partai politik tergambar ke dalam sebuah istilah

yang disebut dengan aliran. Dukungan masyarakat di Pulau Jawa terhadap suatu partai politik cenderung didorong oleh orientasi agama atau aliran. Geertz lebih lanjut lagi mengemukakan bahwa terdapat tiga tipe aliran di dalam struktur masyarakat Jawa yakni Santri, Abangan dan Priyayi. Pada masanya, untuk kelompok santri, kelompok tersebut banyak dikaitkan dengan partai-partai Islam seperti NU dan Masyumi, sedangkan kelompok abangan kuat hubungannya dengan partai komunis. Kelompok priyayi banyak dikaitkan dengan partai nasionalis seperti PNI. Dengan banyaknya kelompok santri di Kota Tasikmalaya. Afiliasi antara pesantren dengan partai politik cenderung mengikuti aliran dari pesantren tersebut seperti contoh pesantren yang beraliran Nu lebih cenderung memilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sedangkan pesantren yang beraliran Persis cenderung lebih dekat dengan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi afiliasi individu terhadap kelompok atau partai politik yang dikemukakan oleh (Nasir, 2015) yakni diantaranya organisasi keagamaan yang diikuti, Kyai tempat seorang individu tersebut melakukan kegiatan keagamaan seperti mengaji, dan informasi mengenai politik yang didapatkan melalui partai dan kandidat yang kompeten. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, faktor organisasi keagamaan dinilai mempunyai peran yang signifikan dalam menentukan afiliasi seorang individu terhadap suatu kelompok politik atau partai politik. Potensi serta gejala dini dari polarisasi harus menjadi disiasati, terutama pada masa menjelang pemilu di tahun 2024.

**Grafik 5. 6 Penerimaan Presiden dari Agama Lain oleh Masyarakat Jawa Barat**



Sumber: (*Indonesian Politics Research and Consulting (IPRC), 2021*)

Berdasarkan grafik diatas, masyarakat Jawa Barat kurang menerima presiden yang berasal dari luar agama yang dianutnya. Sebagaimana data yang telah ditunjukkan, Masyarakat Jawa Barat mayoritas memeluk agama Islam, maka dari itu penerimaan masyarakat Jawa Barat terhadap presiden yang berada di luar agama Islam cukup tinggi.

Terdapat sebanyak 66,9% respon memilih bahwa mereka menolak atau keberatan untuk memilih atau memiliki presiden yang memeluk agama selain Islam, sedangkan terdapat sebanyak 27,3% responden menyatakan bahwa mereka tidak keberatan dalam memilih atau memiliki presiden yang memiliki agama yang berbeda dari apa yang mereka yakini. Nilai tersebut menjadi salah satu indikator dalam menggambarkan fenomena yang terjadi pada masyarakat dalam iklim toleransi di Jawa Barat, khususnya dalam menggambarkan hubungan sosial antarmasyarakat yang berbeda agama. Hal tersebut dapat pula berimplikasi kepada polarisasi kelompok keagamaan yang disebabkan oleh perbedaan pandangan dan pilihan politik di Pemilihan Presiden maupun Pemilihan kepala daerah.

### 5.3 Kerukunan Umat Beragama pada pemilu 2019 di Provinsi Jawa Barat

Kerukunan umat beragama di Provinsi Jawa Barat dapat dianalisis melalui Indeks Toleransi yang disusun berdasarkan empat dimensi berikut yang diantaranya: Hubungan Sosial, Hubungan Keagamaan, Nilai Sosial, dan Peran Pemerintah. Indeks Toleransi yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan Indeks Toleransi yang dihasilkan melalui Kajian Indeks Toleransi yang dilakukan oleh Indonesian *Politics Research and Consulting* (IPRC) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2021. Indeks Toleransi tersebut terdiri dari beberapa kategori penilaian yakni Sangat Rendah, Rendah, Sedang, Tinggi, dan Sangat Tinggi. Berikut merupakan hasil dari Indeks Toleransi di Provinsi Jawa Barat berdasarkan perwakilan masing-masing kedaerahannya:

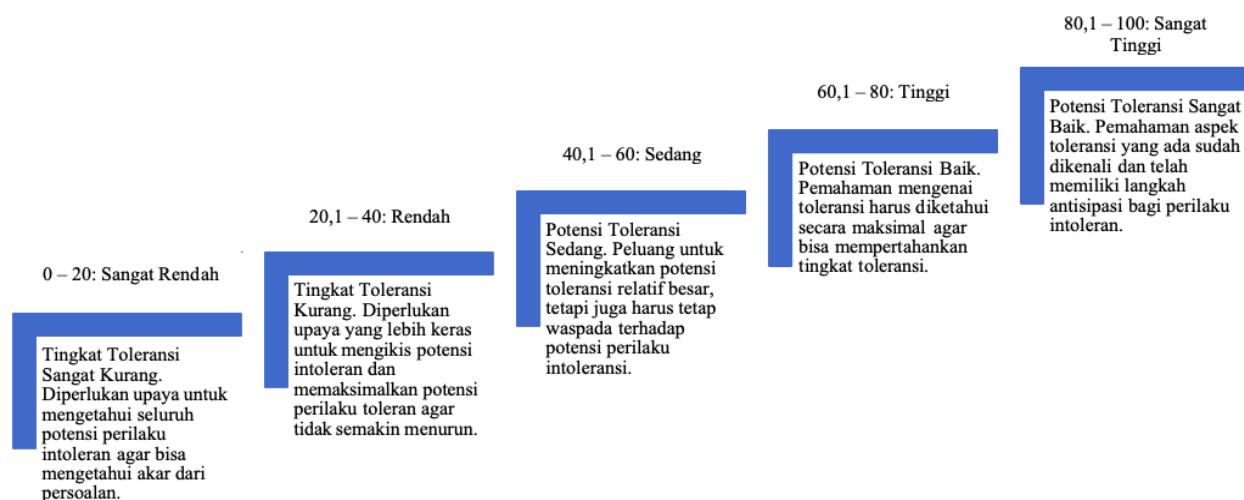
Tabel 5. 1 Indeks Toleransi di 9 Kabupaten/Kota di Jawa Barat

No	Kabupaten/Kota	Karakteristik Demografis	Dimensi								Skor Indeks	Kategori
			Hubungan Sosial		Hubungan Keagamaan		Nilai Sosial		Peran Pemerintah			
			Total Dimensi	Skor	Total Dimensi	Skor	Total Dimensi	Skor	Total Dimensi	Skor		
1	Kab. Cirebon	Transisi (Sub-urban)	1316	67,98	508	57,73	1128	71,21	764	72,35	67,32	Tinggi
2	Kota Bogor	Perkotaan (Urban)	1288	66,53	479	54,43	1081	68,24	781	73,96	65,79	Tinggi
3	Kab. Garut	Pedesaan (Rural)	1185	61,21	459	52,16	1027	64,84	746	70,64	62,21	Tinggi
4	Kota Bekasi	Perkotaan (Urban)	1242	64,15	451	51,25	989	62,44	707	66,95	61,20	Tinggi
5	Kab. Ciamis	Pedesaan (Rural)	1104	57,02	348	39,55	986	62,25	886	83,9	60,68	Tinggi
6	Kota Depok	Perkotaan (Urban)	1058	54,65	410	49,59	1031	65,09	752	71,21	59,39	Menengah
7	Kab. Purwakarta	Transisi (Sub-urban)	1296	66,94	392	44,55	848	53,54	733	69,41	58,61	Menengah
8	Kab. Tasikmalaya	Pedesaan (Rural)	1127	58,21	370	42,05	984	62,12	664	62,88	56,31	Menengah
9	Kab. Karawang	Transisi (Sub-urban)	1138	58,78	361	41,02	909	57,39	712	67,42	56,15	Menengah

Sumber: Kajian IPRC mengenai Indeks Toleransi di Jawa Barat 2021



Chart 5. 1 Kategori Skor Indeks Toleransi



Sumber: Kajian IPRC mengenai Indeks Toleransi di Jawa Barat 2021

Berdasarkan hasil dari Indeks Toleransi diatas, Sembilan Kabupaten/Kota yang menjadi perwakilan sesuai dengan kedaerahannya di Jawa Barat berada di tingkat menengah dan tinggi. Hal tersebut tentunya merupakan kabar menggembirakan bagi Pemerintah Jawa Barat bahwa potensi perilaku toleran diantara masyarakat Jawa Barat tinggi, begitupula dengan tingkat kerukunan umat beragama di Jawa Barat. Kabupaten Cirebon terbukti menjadi daerah yang paling toleran di Provinsi Jawa Barat dengan skor indeks sebesar 67,32 (berada di dalam kategori “tinggi”). Tingginya tingkatan toleran di suatu daerah dapat diakibatkan oleh sedikitnya kelompok moderat di dalam ruang lingkup masyarakat beragama karena kelompok moderat cenderung dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan sosial tanpa mengurangi atau melepaskan nilai-nilai keagamaan yang dianutnya. Tentunya, dalam Islam juga disebutkan beberapa karakteristik dari kelompok moderat seperti diantaranya: toleran terhadap perbedaan pendapat, menghindari kekerasan, memprioritaskan dialog, mengakomodir konsep-konsep modern yang secara substansial mengandung maslahat, berpikir rasional berdasarkan wahyu, menafsirkan teks secara kontekstual, menggunakan ijtihad di dalam menafsirkan apa yang terdapat di Al-Quran atau Sunnah dan memiliki sikap *tawassut* atau bersikap normal dalam mengimplementasikan ajaran agama (Indonesian Politics Research and Consulting (IPRC), 2021).

Disisi lain, Kabupaten Karawang menjadi daerah di Provinsi Jawa Barat dengan nilai indeks toleransi terendah dengan skor sebesar 56,15. Dalam tingkatan “menengah”, Kabupaten Karawang potensi terciptanya kondisi toleran di masyarakat masih dapat dimaksimalkan, namun potensi atau ancaman terhadap perilaku intoleran juga sama tingginya dengan kesempatan pemerintah dan masyarakat untuk membangun situasi dan kondisi yang toleran dan akur antar sesama umat beragama. Kabupaten Karawang, tentunya, dikenal sebagai Kawasan Industri dengan struktur masyarakat yang heterogen serta latar belakang masyarakat yang bermacam-macam karena dipenuhi oleh tenaga kerja dari berbagai daerah. Semakin

heterogen suatu masyarakat, maka akan semakin tinggi potensi konflik horizontal yang ada apalagi masyarakat tersebut sulit untuk menerima perbedaan pendapat dan perbedaan diantara sesama. Hal tersebut tentunya berpengaruh kepada kondisi kerukunan umat beragama di Kabupaten Karawang.

Kerukunan umat beragama di Jawa Barat juga terlihat melalui bagaimana kesediaan dari kelompok agama satu dengan yang lainnya untuk berbaur dan berteman. Hal tersebut tentunya mencirikan terkait dengan tinggi atau rendahnya potensi disintegrasi suatu masyarakat. Semakin tidak bersedia suatu kelompok yang berbeda untuk menjalin hubungan pertemanan dan persaudaraan, maka semakin tinggi potensi polarisasi serta minimnya tingkat kerukunan beragama di daerah tersebut. Berdasarkan survei indeks toleransi di Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Indonesian *Politics Research and Consulting* (IPRC) terdapat penemuan terkait dengan kesediaan masyarakat Jawa Barat untuk berteman dengan kelompok agama yang berbeda yakni sebagai berikut:

Berdasarkan grafik diatas, Masyarakat Jawa Barat memiliki kesediaan yang tinggi dalam berteman dengan kelompok agama yang berbeda. Sebanyak 87,4% responden menyatakan bersedia untuk berteman dengan orang yang berbeda agama, sedangkan sebanyak 10,6% responden menyatakan tidak bersedia untuk berteman dengan orang yang berbeda dari agama mereka. Meskipun menggembirakan, potensi disintegrasi yang dapat dihasilkan melalui 10,6% responden yang enggan untuk berteman dengan individu yang berbeda dari agama yang mereka anut harus menjadi perhatian.

Berdasarkan kasus di tiap-tiap daerah di Jawa Barat, peningkatan dialog dan diskusi lintas agama meningkat menjelang pemilihan presiden pada tahun 2019. Fungsi dari forum-forum lintas agama seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tiap-tiap daerah juga ditingkatkan. salah satu contoh kegiatan lintas agama yang dilakukan yakni di Kota Bandung. Terdapat acara seperti yang diinisiasi oleh Arus Informasi Santri (AIS) Jawa Barat, dimana acara tersebut mengundang beberapa alim ulama, para pemimpin daerah, dan sejumlah tokoh di Jawa Barat untuk melakukan kegiatan doa bersama dalam mewujudkan pemilihan umum yang aman dan kondusif pada tahun 2019. Menurut salah satu perwakilan dari AIS, ajang pemilihan umum tidak seharusnya menjadi ajang yang memecah belah masyarakat, tetapi menjadi sarana untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah yang diselimuti oleh demokrasi yang penuh dengan kejujuran dan jauh dari hal hal negatif seperti hoaks dan kebohongan. Acara tersebut dimeriahkan dengan doa dari 5000 jamaah takmir masjid, majelis taklim, dan pesantren.(Kompas, 2019)

Selain di Kota Bandung, Ribuan masyarakat lintas agama melakukan silaturahmi di Monumen Perjuangan Rakyat Kota Bekasi. Berbagai elemen masyarakat yang diwakili oleh Kepala daerah Kota Bekasi, Kepolisian Kota Bekasi, TNI, FKUB, dan tokoh masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat dari berbagai kelompok keagamaan seperti Islam, Kristen,

Katolik, Budha, Hindu, dan Konghucu turut memeriahkan acara tersebut. acara yang merupakan upaya dalam mewujudkan kondisi pemilihan umum tahun 2019 yang damai dan kondusif dilaksanakan dengan menegaskan bahwa meskipun pilihan presiden dapat berbeda, namun salam lima jari sebagai bentuk salam pengendalian untuk bersama membangun Kota Bekasi merupakan hal yang harus diteguhkan, bukan malah menggarisbawahi perbedaan pilihan yang ada. Hal tersebut dikemukakan oleh Walikota Bekasi, Dr. Rahmat Effendi, pada kesempatan tersebut. selain itu, beberapa tokoh pemuka agama memberikan sambutan, yang secara umum, seluruh pemuka agama dari masing-masing perwakilan kelompok agama sepakat bahwa acara silaturahmi tersebut merupakan acara yang penting bagi Kota Bekasi sebagai miniatur keberagaman agama. (Bekasikota.go.id, 2019)

Selain itu, Pemerintah Kota Bogor melakukan tindakan pencegahan polarisasi dan meningkatkan kerukunan antar umat beragama dengan melakukan penanam pola pikir toleran kepada masyarakat Kota Bogor. Salah satu upayanya yakni dilakukan oleh Walikota Bogor, Bima Arya, dimana beliau menyampaikan kepada masyarakat Kota Bogor di dalam acara peresmian Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) Kota Bogor bahwa, dalam menyosong pemilihan legislatif dan pemilihan presiden Tahun 2019, penting bagi masyarakat Kota Bogor untuk menjaga keutuhan serta kerukunan antar umat beragama. Beliau mengemukakan bahwa jangan sampai kepentingan ekonomi, sosial, maupun politik dapat menghasilkan perpecahan bangsa. (KotaBogor.go.id, 2018)

Hal diatas juga sejalan apa yang dikemukakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jawa Barat. Dilansir dari pemberitaan Pikiran Rakyat, FKUB mengemukakan bahwa masyarakat Jawa Barat diyakini merupakan masyarakat yang cerdas dan dewasa dalam melalui proses pemilu tahun 2019. FKUB Jawa Barat menegaskan bahwa masyarakat Jawa Barat tidak perlu terlibat ke dalam kegaduhan politik. Hal tersebut merupakan hal yang sama ditegaskan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketua MUI Jawa Barat, KH Rachmat Syafei, mengimbau bahwa masyarakat Jawa Barat untuk tidak terlibat ke dalam kegaduhan politik yang terjadi di dalam pilpres 2019 karena, pada saat itu, unsur-unsur politik sudah masuk ke dalam dimensi keagamaan, sehingga hal-hal berbau agama rentan ditunggangi oleh oknum-oknum di dalam pilpres 2019. (Pikiran Rakyat, 2019)

Lebih lanjut lagi, terdapat beberapa daerah di Provinsi di Jawa Barat yang berpotensi tinggi dalam polarisasi kelompok keagamaan yakni diantaranya sebagai berikut:

Tabel 5. 2 Penerimaan Gubernur dari Agama Lain

	Base	Keberatan	Tidak Keberatan	Tidak Tahu/Tidak Jawab
<b>Wilayah</b>				
Ciamis	11,1	84,1	15,9	0,0
Cirebon	11,1	61,4	38,6	0,0
Kota Depok	11,1	81,8	0,0	18,2
Garut	11,1	77,3	20,5	2,3
Karawang	11,1	75,0	18,2	6,8
Kota Bekasi	11,1	31,8	50,0	18,2
Kota Bogor	11,1	61,4	36,4	2,3
Purwakarta	11,1	34,1	61,4	4,5
Tasikmalaya	11,1	72,7	25,0	2,3
<b>Usia</b>				
>75	1,5%	83,3	16,7	0,0
17-24	8,1%	87,5	6,3	6,3
25-38	25,8%	66,6	26,5	6,9
39-58	48,7%	61,7	31,6	6,7
59-74	15,7%	54,9	41,9	3,2
Tidak tahu / Tidak mau menjawab	0,3%	100,0	0,0	0,0
<b>Pendidikan</b>				
Tamat Diploma atau Tamat S-1	9,8%	51,3	35,9	12,8
Tamat S-2 atau lebih tinggi	0,3%	0,0	100,0	0,0
Tamat SD/ sederajat	25,3%	69,0	27,0	4,0
Tamat SLTA/ sederajat	28,5%	66,7	28,1	5,2
Tamat SLTP/ sederajat	20,5%	66,7	28,4	4,9
Tidak pernah sekolah	2,8%	63,6	27,3	9,1
Tidak tamat perguruan tinggi/ masih mahasiswa	0,3%	0,0	100,0	0,0
Tidak tamat SD/ sederajat	8,1%	68,8	25,0	6,3
Tidak tamat SLTA/ sederajat	2,8%	72,7	27,3	0,0
Tidak tamat SLTP/ sederajat	1,8%	42,9	42,9	14,3

Sumber: Indonesian Politics Research and Consulting (IPRC), (2021)

Berdasarkan tabel diatas, Kota Ciamis menjadi kota dengan tingkat keberatan tertinggi dalam menerima calon gubernur yang berasal dari agama lain. Kota Ciamis mendapatkan persentase sebanyak 84,1 % menyatakan keberatan untuk memilih pemimpin daerah yang berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Disisi lain, Kota Depok menempati posisi kedua dan Kota Garut menempati posisi ketiga tertinggi.

Tingginya tingkat penolakan di Kabupaten Ciamis sejalan dengan isu-isu keagamaan yang berkembang di daerah tersebut seperti salah satunya yakni kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Muhammad Kece pada Tahun 2021. Kasus penistaan agama Islam yang dilakukan di Kab. Ciamis tersebut dilakukan dengan propaganda yang disebar oleh M. Kece di Kanal Youtubnya mengenai ajaran Islam yang tidak sesuai dan Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu pengikut Jin. Lantas, hal tersebut memicu kontradiksi dan kegeraman dari berbagai pihak, salah satunya santri dan kyai, yang kemudian melakukan aksi unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri setempat. Akhirnya M. Kece divonis penjara selama 10 Tahun. Hal tersebut menandakan bahwa sentimen agama masih sangat kental di Kabupaten Ciamis, sehingga hal-hal negatif yang menyangkut satu agama dapat menimbulkan reaksi yang begitu massif (Tribun News, 2021)

Disisi lain, Kota Depok dinobatkan menjadi kota intoleran selama dua tahun berturut-turut berdasarkan skor toleransi yang tercatat pada dua laporan Indeks Kota Toleran (IKT) dari SETARA Institute. Kota Depok mendapatkan skor senilai 2,00 atau masuk ke dalam kategori rendah. Hal tersebut disebabkan oleh adanya lima isu keagamaan yang terjadi di Kota Depok seperti diantaranya pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok dalam Rangka Penyelenggaraan Kota Depok sebagai Kota Religius, diskriminasi dua siswa berhijab dalam proses pelaksanaan praktik kerja lapangan, perlarangan perayaan Valentin's Day, kesepakatan rapat soal Raperda Kota Religius, dan demonstrasi desakan untuk warga Ahmadiyah di Masjid

Al-Hidayah untuk menghentikan kegiatannya. Isu dan peristiwa yang terjadi disebabkan oleh adanya kemunculan dari politik favoritisme dan kaum konservatif. (Detik News, 2022)

Yang terakhir, Kota Garut menempati posisi ketiga sebagai kota yang meraih tingkat ketidaksediaan masyarakat untuk memilih kepala daerah yang berbeda dengan latar belakang agamanya. Hal tersebut sejalan dengan apa juga yang dikemukakan oleh Bupati Garut, Rudy Gunawan, dimana beliau mengemukakan bahwa isu intoleran dan radikalisme masih menjadi permasalahan yang serius. Isu-isu tersebut terjadi akibat penyebaran paham-paham yang kurang sesuai dengan nilai-nilai toleransi dan kesatuan. Terdapat dari kurang lebih 41 dari 42 kecamatan yang terpatap paham-paham intoleran menuju kepada radikalisme. Penyebaran paham tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi bagi para ulama, khususnya di kabupaten Garut, sehingga Rudy mengajak kembali dakwah kepada masyarakat dengan menggunakan kemajuan teknologi. Selain itu, peningkatan kolaborasi dengan semua pihak dilakuakn untuk memelihara keamanan dan ketertiban di Kabupaten Garut dengan melibatkan TNI dan Polri dalam upaya pencegahan dan penanganannya. (RepJabar, 2022)

Potensi kerukunan umat beragama dilihat melalui dimensi sosial interaksi diantara kelompok agama yang berbeda. Hal tersebut dikarenakan kerukunan dan polarisasi diantara kelompok keagamaan dipengaruhi oleh interaksi sosial antara individu maupun kelompok. Soerjono Soekanto dalam (Muslim, 2013) mendefinisikan interaksi sosial sebagai hubungan kausalitas atau timbal-balik antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan hubungan antara individu dan kelompok. Definisi lain mengenai interaksi sosial tidak jauh dari apa yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yakni definisi yang dikemukakan oleh Elly M Setiadi dan Usman Kolip. Dikutip dari sumber yang sama, Setiadi dan Kolip mengemukakan bahwa interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang sifatnya dinamis dan berkaitan dengan hubungan antara individu dan individu, kelompok dengan kelompok, dan perorangan dengan kelompok maupun sebaliknya.

Interaksi sosial dapat berbentuk asosiatif dan disosiatif. Ketika suatu interaksi sosial bersifat asosiatif, interaksi tersebut cenderung bersifat menyatukan seperti kerja sama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi, sedangkan interaksi sosial yang berbentuk disosiatif cenderung bersifat memecah belah seperti persaingan/kompetisi, kontravensi, dan konflik. Konflik merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang disosiatif akibat adanya perbedaan paham yang mendasar, sehingga menghasilkan selisih atau perbedaan cara pandang yang mempersulit interaksi sosial diantara pihak-pihak tersebut.

Dalam dimensi sosial, permasalahan yang menjadi tantangan dalam proses interaksi sosial di dalam negara multikultural seperti Indonesia adalah etnosentrisme, kurangnya pemahaman dari nilai budaya, stereotip, dan prasangka. Keempat hal tersebut merupakan tantangan yang dimiliki oleh Indonesia untuk mencegah terjadinya polarisasi dan tetap menjaga persatuan dan

kerukunan kelompok beragama di Indonesia. Permasalahan seperti stereotip, perasaan lebih baik dari suatu kelompok tertentu, dan prasangka dapat menyebabkan polarisasi dan mengancam kerukunan umat beragama.

Komunikasi antarbudaya juga berpengaruh ke dalam kondisi dan situasi dari polarisasi dan kerukunan umat beragama. Rich dan Ogawa dalam (Bahri & Subhani, 2017) menggambarkan komunikasi antarbudaya sebagai komunikasi diantara kelompok atau individu yang berbeda dalam segi kebudayaan seperti suku, ras, bangsa, etnis dan suku yang melibatkan komunikasi pribadi, antarpribadi, dan kelompok dengan penekanan latar belakang yang berbeda dan mempengaruhi perilaku para pelaku yang berkomunikasi. Maka dari itu, budaya merupakan sebuah konstruksi individual-psikologis dan juga konstruk sosial-makro. Perbedaan terhadap individu dalam aspek budaya dapat dilihat melalui batasan sampai mana individu tersebut dapat mengadopsi dan terlibat dalam sikap, nilai, keyakinan, dan perilaku yang berdasarkan kesempatan untuk membentuk budaya mereka.

Sejauh ini, Potensi dari kerukunan antara kelompok keagamaan di Provinsi Jawa Barat dapat terbilang cukup tinggi. Kerukunan tersebut dapat terlihat melalui kesediaan kelompok atau individu yang berbeda agama untuk saling berteman. Hal tersebut dikemukakan melalui hasil survei Indonesian *Politics Research and Consulting* (IPRC) mengenai kajian indeks toleransi di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2021 diatas (lihat grafik 5.1). Berdasarkan hasil survei diatas, Terdapat sebanyak 87,4% responden menjawab bersedia untuk berteman dengan individu yang berasal dari agama lain, sedangkan 10,6% responden menjawab tidak bersedia dan sisanya, yakni 2,0% responden menjawab tidak tahu/tidak jawab. Hal tersebut tentunya menepis argumentasi bahwa masyarakat Jawa Barat merupakan masyarakat dengan kultur yang kurang toleran. Dilansir dari kanal MUI Jabar (2022), Indeks kerukunan umat beragama di Jawa Barat dianggap rendah dari beberapa survei yang hasilnya bertolak belakang dengan hasil yang didapat dari hasil survei IPRC diatas. Perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat, Rachmat, mengemukakan bahwa hasil survei bukanlah satu-satunya patokan untuk mengukur toleransi dan kerukunan umat beragama di Jawa Barat. Menurut klaimnya, MUI Jawa Barat juga turut mengupayakan kondisi harmonis dan rukun antara umat beragama melalui komisi kerukunan umat beragama dan komisi ukhuwah Islamiyah. Meskipun Provinsi Jawa Barat tidak masuk ke dalam 10 provinsi dengan Indeks kerukunan umat beragama tertinggi, peningkatan terhadap skor indeks kerukunan umat beragama di Jawa Barat patut diapresiasi, pada tahun 2021, Indeks kerukunan umat beragama mencapai 72,7% dari 64,41% di tahun 2019 (MUI Jabar, 2022). Meskipun terhadap potensi konflik yang dihasilkan dari 10,6% responden yang menjawab tidak bersedia, namun hal tersebut dapat dicegah dengan banyaknya dialog lintas-agama atau *inter-faith* untuk mencegah konflik yang terjadi akibat prasangka dan pandangan merasa satu kelompok lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok lainnya.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Melihat dari isu yang berkembang, Potensi dari polarisasi kelompok keagamaan yang mungkin akan terjadi pada tahun politik 2024 masih terbilang cukup tinggi. Hal tersebut dapat dilihat melalui banyak temuan survei yang mengemukakan tentang kesediaan mereka dalam memilih Presiden yang memiliki latar belakang berbeda secara agama dengan pemilihnya. Hal tersebut menandakan bahwa aspek kesamaan agama masih signifikan menjadi faktor pendorong bagi pemilih untuk memilih calon kepala daerah.

Ketidaksediaan para pemilih untuk memilih calon kepala daerah yang berasal dari luar agama Islam menjadi salah satu indikator yang menandakan kerentanan terhadap polarisasi yang disebabkan oleh agama yang menjadi kepentingan yang ditanggung oleh sekelompok orang untuk memenangi kandidat calon kepala daerah. Budaya politik keagamaan yang begitu kental, terutama di beberapa daerah di Provinsi Jawa Barat seperti Kota Garut, Ciamis, dan Depok dapat menjadi celah dalam berkembangnya paham-paham intoleran yang dapat mengancam persatuan bangsa dan negara, terutama dalam Pilpres 2024. Ketiga kota tersebut merupakan kota dengan tingkat tertinggi penolakan terhadap gubernur yang berasal dari agama lain.

Disisi lain, pembahasan mengenai kerukunan umat beragama di Provinsi Jawa Barat berbanding terbalik dengan hasil Analisa mengenai potensi dari polarisasi. Polarisasi lebih mungkin terjadi dalam pemilu di tahun 2024 dikarenakan pilihan presiden yang harus berdasarkan kepada agama dari masing-masing pemilih, namun hal tersebut kurang berpengaruh terhadap kerukunan umat beragama. Kondisi kerukunan umat beragama di Jawa Barat masih masuk ke dalam kondisi yang rukun, dengan tingkat toleransi yang juga baik. Jadi meskipun polarisasi mungkin terjadi akibat pilihan politik masing-masing kelompok keagamaan, namun kerukunan di dalam umat beragama di Jawa Barat terjalin. Hal tersebut dapat terlihat dari hasil indeks toleransi yang dikemukakan diatas, yang mengemukakan bahwa sebenarnya Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang cukup toleran dan dengan hasil survei yang mengemukakan kesediaan masyarakat Jawa Barat untuk berteman dan membaaur dengan anggota masyarakat yang berbeda latar belakang agama.

#### **6.2 Rekomendasi**

Rekomendasi yang dapat diberikan dari kajian ini adalah:

- Penguatan perkembangan pendidikan politik kepada kelompok keagamaan oleh Pemerintah setempat atau bekerja sama dengan kelompok sosial kemasyarakatan dengan menekankan bagaimana cara menggunakan hak politik

dengan benar dan gagasan mengenai perpolitikan berdasarkan wawasan kebangsaan, sehingga dapat menekan potensi polarisasi yang disebabkan oleh pilihan politik suatu individu atau kelompok

- Menguatkan fungsi-fungsi forum seperti FKUB, Kesbangpol, dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan dialog *inter-faith* secara rutin dan berkala menyongsong tahun politik di tahun 2024.
- Melakukan kajian lebih lanjut mengenai program penguatan toleransi dan kerukunan umat beragama yang dapat menjadi mekanisme panduan dalam menguatkan fungsi Kesbangpol sebagai badan pemerintah yang menunjang bidang kesatuan dan politik
- Melakukan deteksi dini mengenai kelompok-kelompok intoleran yang berpotensi muncul dalam pilpres 2024, sehingga dapat menekan ancaman polarisasi yang dapat terjadi terutama di sekolah agama dan tempat beribadah
- Menguatkan dan mengintegrasikan kampanye politik anti SARA oleh pemerintah daerah dan Lembaga kemasyarakatan



## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2022). *Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2022*.
- Bahri, R., & Subhani. (2017). *KOMUNIKASI LINTAS BUDAYA*.
- Bekasikota.go.id. (2019, July 6). *Ribuan Masyarakat Lintas Agama Silaturahmi di Monumen Perjuangan Rakyat Bekasi*. <https://Bekasikota.Go.Id/Detail/Ribuan-Masyarakat-Lintas-Agama-Silaturahmi-Di-Monumen-Perjuangan-Rakyat-Bekasi>.
- Budiyono, B., Kokotiasa, W., Harmawati, Y., & Feriandi, Y. A. (2018). *Social Cohesion in Society: A Study on Inter-Religious Harmony*.
- CNN Indonesia. (2021, October 4). *Intoleransi Beragama di Jatim & Jabar Diklaim Naik 2019-2020*. CNNIndonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211004181458-20-703252/intoleransi-beragama-di-jatim-jabar-diklaim-naik-2019-2020>
- Detik News. (2022, March 31). *2 Tahun Berturut-turut Depok Jadi Kota Intoleran Versi SETARA*. <https://News.Detik.Com/Berita/d-6009418/2-Tahun-Berturut-Turut-Depok-Jadi-Kota-Intoleran-Versi-Setara/2>.
- Dr. Asrinaldi. (2022, October 25). *Seminar Tata Kelola Pemilu - Tantangan Penyelenggara Pemilu Tahun 2024*. FISIP Magister Unpad.
- Dra. Mudiayati Rahmatunisa. (2022, October 25). *Seminar Tata Kelola Pemilu - Tantangan Penyelenggara Pemilu Tahun 2024*. FISIP Magister Unpad.
- Husin Khairah. (2014). Peran Mukti Ali dalam Pengembangan Toleransi Antar Agama di Indonesia. *Jurnal Ushuluddin*, XXI(1), 101.
- Indonesia.go.id. (n.d.). *Profil Indonesia: Suku Bangsa*. <https://Indonesia.Go.Id/Profil/Suku-Bangsa/Kebudayaan/Suku-Bangsa>.
- Indonesian Politics Research and Consulting (IPRC). (2021). *Laporan Kajian Indeks Toleransi di 9 Kabupaten Kota Jawa Barat*.
- Khoirul Fatih, M. (2017). *DIALOG DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA DALAM PEMIKIRAN A. MUKTI ALI*.
- Kompas. (2019, January 24). *Ulama dan Umat Jabar Akan Doa Bersama Demi Pilpres Damai*. <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2019/01/24/20144711/Ulama-Dan-Umat-Jabar-Akan-Doa-Bersama-Demi-Pilpres-Damai>.

- KotaBogor.go.id. (2018, November 24). *Bima Arya Ajak Pelihara Kerukunan Antar Umat Beragama Jelang Pilpres*.  
[https://Kotabogor.Go.Id/Index.Php/Show\\_post/Detail/11052](https://Kotabogor.Go.Id/Index.Php/Show_post/Detail/11052).
- Muhtadi, B. (2017). *Politik Identitas dan Mitos Pemilih Rasional*. <https://megapolitan>.
- MUI Jabar. (2022, March 28). *Toleransi di Jabar Dianggap Rendah, MUI: Tidak Benar!*  
<https://Mui.or.Id/Mui-Provinsi/Mui-Jabar/34166/Toleransi-Di-Jabar-Dianggap-Rendah-Mui-Tidak-Benar/>.
- Muslim, A. (2013). *Interaksi Sosial dalam Masyarakat Multi-etnis*. 1(3).
- Nasir, N. (2015). KYAI DAN ISLAM DALAM MEMPENGARUHI PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT KOTA TASIKMALAYA. *Jurnal Politik Profetik*, 6(2).
- Nurhayati, Setiyowati, R., & Nurmalisa, Y. (2021). *Bhinneka Tunggal Ika As A National Consensus And A Universal Tool Of The Indonesian Nation*. 6(2).
- Open Data Prov. Jabar. (2021, August). *Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Akhir di Jawa Barat*. <https://Opendata.Jabarprov.Go.Id/Id/Dataset/Jumlah-Penduduk-Berdasarkan-Pendidikan-Akhir-Di-Jawa-Barat>.
- Perry, S. L. (2022). American Religion in the Era of Increasing Polarization. In *Annual Review of Sociology* (Vol. 48). Annual Reviews Inc. <https://doi.org/10.1146/annurev-soc-031021-114239>
- Pikiran Rakyat. (2019, May 8). *Pemilu 2019, Ulama Yakin Masyarakat Jabar Cerdas dan Dewasa*. <https://Www.Pikiran-Rakyat.Com/Bandung-Raya/Pr-01311720/Pemilu-2019-Ulama-Yakin-Masyarakat-Jabar-Cerdas-Dan-Dewasa>.
- Quin Pasaribu. (2019, April 12). *Pemilu: Perebutan suara di Jawa Barat, pemilih masih berlandas "agama."* <https://Www.Bbc.Com/Indonesia/Indonesia-47867651>.
- RepJabar. (2022, March 7). *Bupati Garut Sebut 41 Kecamatan Terpapar Paham Intoleransi Menuju Radikalisme*.  
<https://Repjabar.Republika.Co.Id/Berita/R8blpo396/Bupati-Garut-Sebut-41-Kecamatan-Terpapar-Paham-Intoleransi-Menuju-Radikalisme>.
- Ronaldo, R., & Darmaiza. (2021). Politisasi Agama dan Politik Kebencian pada Pemilu Presiden Indonesia 2019. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 3(1), 33–48.  
<https://doi.org/10.36256/ijrs.v3i1.150>
- Setiawan, E. (2016). POLA RELASI PATRON KLIEN DI PESANTREN DARUL FIKRI MALANG. *Universum*, 10(1), 13–24.

- Sharp, D. (2022). Democratic citizenship and polarization: Robert Talisse's theory of democracy. *Ethical Theory and Moral Practice*. <https://doi.org/10.1007/s10677-022-10314-8>
- Siregar, M. (2021). Partisipasi Organisasi Keagamaan Dalam Penyiaran Dakwah Islam di Kota Langsa. *Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial Dan Kebudayaan*, 12(2), 78–90. <https://doi.org/10.32505/hikmah.v12i2.3438>
- Tempo. (2019, May 13). *Rekapitulasi KPU Jabar, Jokowi-Maruf Hanya Unggul di 6 Daerah*. <https://Pilpres.Tempo.Co/Read/1205027/Rekapitulasi-Kpu-Jabar-Jokowi-Maruf-Hanya-Unggul-Di-6-Daerah>.
- Tribun News. (2021, November 22). *M Kece Tersangka Kasus Penistaan Agama Berada di Polres Ciamis, Begini Penjelasan Kapolres*. <https://www.tribunnews.com/Regional/2021/11/22/m-kece-tersangka-kasus-penistaan-agama-berada-di-polres-ciamis-begini-penjelasan-kapolres>.
- Viva Budy Kusnandar. (2019, May 19). *Total Jumlah Pemilih Pilpres 2019 di Jawa Barat*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/19/total-jumlah-pemilih-pilpres-2019-di-jawa-barat>.

**SURAT KETERANGAN:**

	<b>PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT</b> <b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>
	Jalan Supratman No. 44 Telepon : (022) 7206174-7205759 Faksimili : (022) 7106286 Website : bakesbangpol.jabarprov.go.id Email : bakesbangpol@jabarprov.go.id Bandung 40121

---

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor: 122/KPG.03.01.01/KESBAK**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Dr. Drs.H.R.IIP HIDAJAT, M.Pd.
Pangkat/Gol. Ruang	: Pembina Utama Muda, / IV/c
Jabatan	: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat
N I P	: 196412151902031005
Alamat	: Jalan Supratman No. 44 Bandung

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: Leo Agustino, Ph.D
Jabatan	: Ketua Tim
Anggota	: Firman Manan, M.A Idil Akbar, M.IP

Telah selesai menyusun Kajian dalam Ketahanan Ekonomi di Jawa Barat tahun 2022 sebagai preferensi pantauan kondisi dan situasi Politik dan Kerukunan Umat Beragama pada Masa Pandemi Covid-19 dengan Judul "Kajian Polarisasi dan Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Jawa Barat" dan "Analisa Partisipasi Politik Masyarakat di Jawa Barat Tahun 2022".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 03 Februari 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 PROVINSI JAWA BARAT



**Dr. Drs. H. R. IIP HIDAJAT, M.Pd.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19641215 199203 1 005